

**HUBUNGAN PEMBINAAN YANG DILAKUKAN DINAS
KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH
DENGAN PRODUKTIVITAS PERAJIN TAS DAN KOPER
DIKECAMATAN TANGGULANGIN**

(Studi Studi: di Koperasi INTAKO Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Pada
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Disusun Oleh :

ACHMAD MUSYARIFIN

960910201188

Pembimbing :

1. Drs. H. Hendro Mulyono
2. Drs. Soetmo. Msi

**ILMU ADMINISTRASI NIAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2002

Novi : Hadiah
Pembelian
Terima : Tgl. 25 12 2002
No. Induk : SICS
Klass
334
MUS
h
e.1

MOTTO

Di dunia ini, kita dapat melihat kecantikan sebagai kecantikan,
Karena pertentangan dari suatu keburukan
Dan mengetahui kebenaran sebagai kebenaran,
Karena pertentangan suatu kejahatan
Telah dan belum bangkit bersama
Sulit dan mudah saling menyelaraskan
Panjang dan pendek saling bertentangan
Tinggi dan rendah saling menyeimbangkan
Depan dan belakang saling mengikuti.
Maka, kebijaksanaan berlaku tanpa melakukan apa-apa,
Diajarkan tanpa diucapkan
Sepuluh ribu hal berevolusi tanpa henti
Ciptakan namun, tidak harus memiliki
Kerjakan, namun tanpa pamrih
Capailah, kemudian lupakan;
Sebab itu yang akan menjadi abadi

(Lao Tzu, Tao Te Ching)

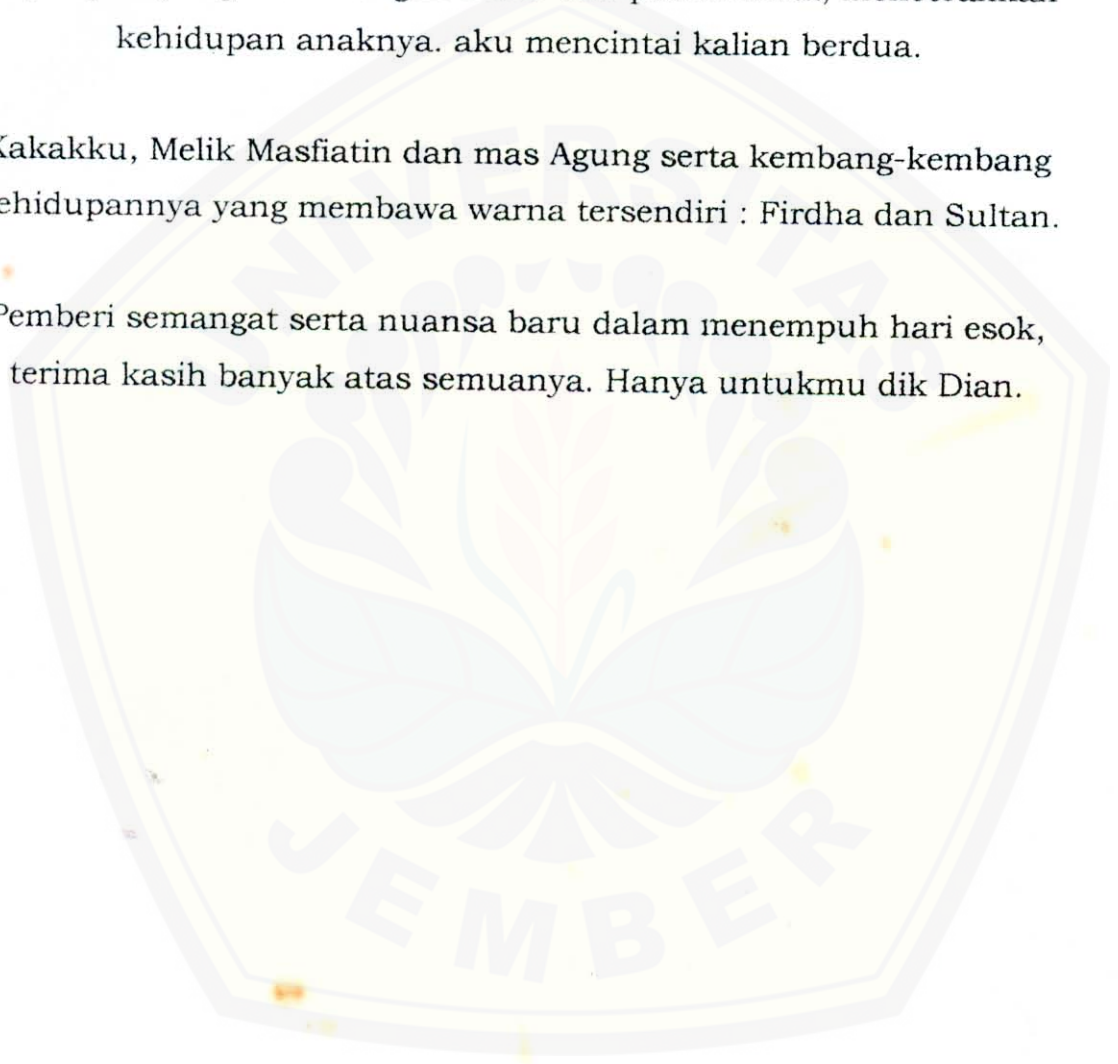
PERSEMBAHAN

Tulisan sederhana ini ku persembahkan kepada :

Bapak sekaligus sahabatku, Machmud Ichsan, yang tanpa dirinya tulisan ini atau apapun judulnya tak akan pernah ada. Ibuku terkasih Miqdaryati yang telah dengan sabar dan penuh cinta, mencerahkan kehidupan anaknya. aku mencintai kalian berdua.

Kakakku, Melik Masfiatin dan mas Agung serta kembang-kembang kehidupannya yang membawa warna tersendiri : Firdha dan Sultan.

Pemberi semangat serta nuansa baru dalam menempuh hari esok, terima kasih banyak atas semuanya. Hanya untukmu dik Dian.



PENGESAHAN

Diterima dan dipertahankan didepan penguji skripsi

Guna mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1)

Program studi Ilmu Administrasi Negara

Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

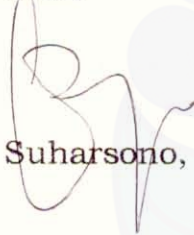
Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Juli 2002

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua



Drs. Agus Suharsono, M.Si

Sekretaris

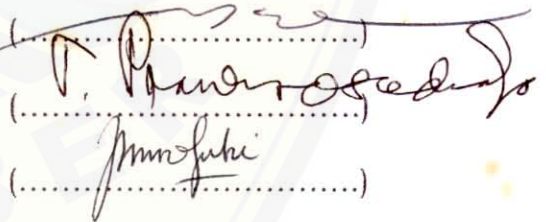
Drs. Bb. Budyantoro Kreet DS, Ms

Anggota

Drs. Anwar, M.si

Prof. Drs. Toekijan. PS

Dra. Anastasia Murdyastuti, M.Si



(.....)

(.....)

(.....)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Drs. H. Moch. Toerki

Nip. 130 524 832

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik sertanya hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan Pembinaan yang Dilakukan Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Produktivitas Pengrajin Tas dan Koper di Kecamatan Tanggulangin”. Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Banyak pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran maupun tenaga pada proses penulisan ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Mudhar Syarifudin, MSi selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Bapak Drs. Budiyo, MSi selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. bapak Drs. H. Hendro Mulyono selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan semangat, dorongan, bimbingan dan petunjuk sehingga skripsi ini telah terealisasi dengan baik.
5. Bapak Drs. Soetomo MSi selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan menambah wawasan dan wacana baru dalam berfikir. Semoga sedikit ilmu yang penulis serap dapat berguna untuk melangkah ke depan.
6. Ibu Dra. Selvy Helphiastuti, MM. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk akademis.
7. Bapak dan ibu dosen serta segenap civitas akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
8. Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Drs. Hariyadi beserta staf yang telah memberikan arahan dan masukan data untuk penyusunan skripsi ini.

9. Keluarga besar Jawa IV no. 4: Achai, Abang, Budi, Jojok, Karim, Lyu, dan keluarga bapak Drs. H. Moh. Soewito yang telah memberikan naungan selama penulis menuntut ilmu.
10. Teman-teman (rombengan AN) '96: Kotrik, Jabrik, Joko, Gogot, Bakrie, Priyo, Pairun, dan yang telah mendahului saya. Kenangan itu tak mungkin terlupa.

Semoga skripsi ini berguna bagi banyak pihak khususnya penulis pribadi maupun untuk perkembangan ilmu administrasi negara. Akhirnya semoga Allah SWT membalas budi dan jasa bapak, ibu, serta saudara sekalian.

Jember, September 2002

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN MOTTO.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	8
1.4 Kerangka Teori.....	9
1.4.1 Konsep Pembangunan.....	9
1.4.2 Konsep Pembinaan Usaha Kecil.....	13
1.4.3 Konsep Produktivitas.....	24
1.5 Hipotesis.....	29
1.6 Definisi Operasional.....	30
1.6.1 Operasionalisasi Variabel Pembinaan oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.....	30
1.6.2 Operasionalisasi Variabel Produktivitas Pengusaha Tas dan Koper.....	32
1.7 Metode penelitian.....	32
II. DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN.....	37
2.1 Deskripsi Daerah Penelitian.....	37
2.2 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.....	37
2.3 Kedudukan Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.....	38
2.4 Tugas Pokok Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.....	39
2.5 Fungsi Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.....	39
2.6 Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.....	40
2.7 Tata Kerja Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.....	57
2.8 Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan.....	57
2.9 Keuangan Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.....	57
2.10 Perajin Tas dan Koper di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.....	59

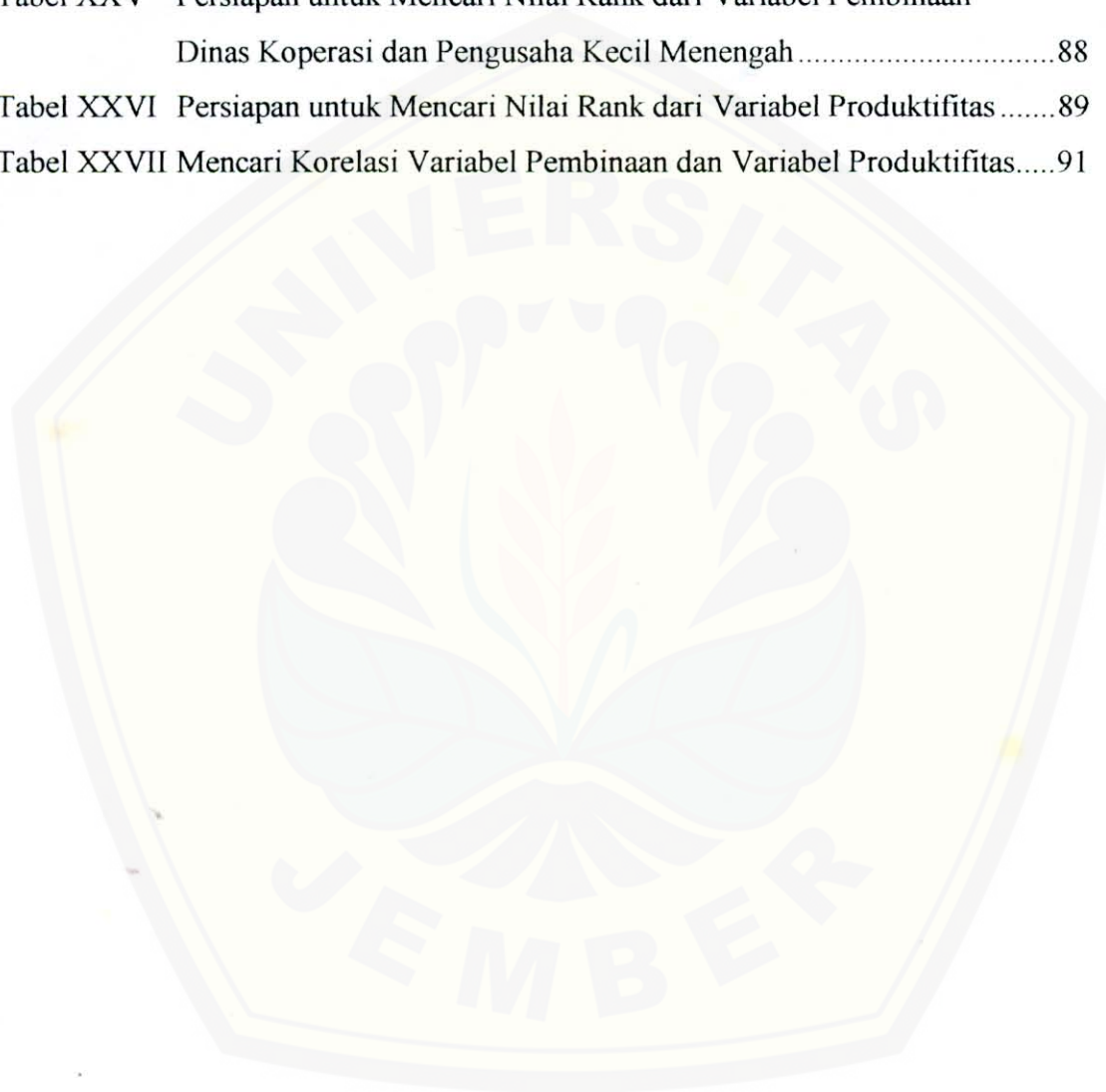
III. PENYAJIAN DATA VARIABEL PENELITIAN.....	64
3.1 Pengantar	64
3.2 Variabel Pengaruh (X) Yaitu Pembinaan Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.....	64
3.3 Variabel Terpengaruh (Y) Yaitu Produktivitas Pengusaha Tas dan Koper.....	75
IV. ANALISIS DAN INTEPRETASI DATA.....	87
4.1 Pengantar	87
4.2 Penentuan Nilai Rank	87
4.3 Perhitungan Nilai Korelasi.....	90
V. KESIMPULAN DAN SARAN	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I	Ciri-Ciri Bantuan Modal Secara Kredit dan Penyertaan Modal Saham.....	17
Tabel II	Realisasi Program Pendidikan dan Latihan Ketrampilan Pada Tahun 1999 – 2001	44
Tabel III	Realisasi Bantuan Kredit Pada Tahun 1999 – 2001	49
Tabel IV	Realisasi Progrm Pameran Usaha pada Tahun 1999 – 2001	51
Tabel V	Realisasi Program Temu Kemitraan pada Tahun 1999 – 2001	52
Tabel VI	Realisasi Kemitraan Antar Pengusaha Kecil pada Tahun 1999 – 2001	52
Tabel VII	Data Perkembangan Perajin Sampai Tahun 2000	60
Tabel VIII	Data Perkembangan Showroom Sampai Tahun 2000	61
Tabel IX	Data Perkembangan Tenaga Kerja	61
Tabel X	Peningkatan Produktivitas Pengusaha Tas dan Koper Tahun 1999 – 2001	62
Tabel XI	Tabel Produktifitas Pengusaha Tas dan Koper Tahun 1996 – 1998....	63
Tabel XII	Data Berdasarkan Skor dari Indikator Penguatan Akses untuk Permodalan	66
Tabel XIII	Data Berdasarkan Indikator Jaringan Usaha	68
Tabel XIV	Data Berdasarkan Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia..	70
Tabel XV	Data Skor Gabungan Variabel Pembinaan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah.....	71
Tabel XVI	Total Skor dan Kategori Variabel Pembinaan Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.....	73
Tabel XVII	Frekuensi Kategori Jawaban Responden Terhadap Variabel X.....	74
Tabel XVIII	Data Berdasarkan Skor dari Indikator Production.....	76
Tabel XIX	Data Berdasarkan Indikator Time Required to the Job	78
Tabel XX	Data Skor Berdasarkan Indikator Increase Learning Rate	80

Tabel XXI	Data Skor Berdasarkan Indikator Decrese Industry Breaking	82
Tabel XXII	Data Skor Gabungan Variabel Produktifitas Perajin Tas dan Koper ..	83
Tabel XXIII	Data Skor Berdasarkan Variabel Produktifitas Perajin Tas dan Koper.....	85
Tabel XXIV	Frekuensi Kategori Jawaban Responden Terhadap Variabel Y	86
Tabel XXV	Persiapan untuk Mencari Nilai Rank dari Variabel Pembinaan Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah	88
Tabel XXVI	Persiapan untuk Mencari Nilai Rank dari Variabel Produktifitas	89
Tabel XXVII	Mencari Korelasi Variabel Pembinaan dan Variabel Produktifitas.....	91



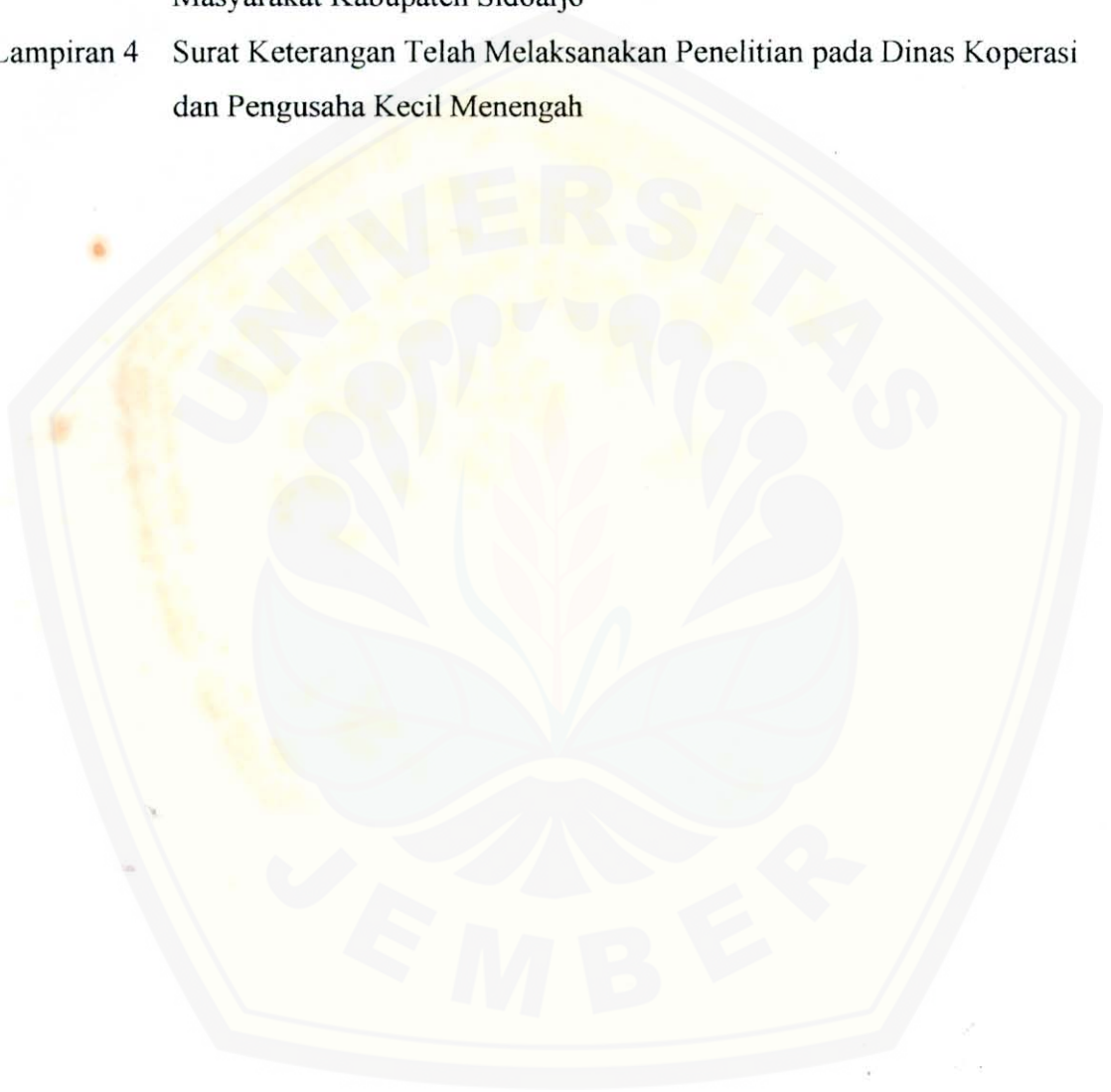
DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Permasalahan Pengusaha Kecil	6
Gambar II	Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Kuesioner
- Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo
- Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian pada Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Usaha untuk meningkatkan produktivitas pengusaha kecil dalam masa krisis multidimensional terutama krisis ekonomi yang melanda Indonesia, menjadi semakin sulit untuk diwujudkan. Semua itu tidak terlepas dari peran pemerintah yang kurang bersungguh-sungguh dalam menjalankan program-program pemberdayaan pengusaha kecil sehingga yang terjadi justru menjadikan mereka pengusaha yang kurang mandiri dan kurang dapat bersaing dengan pengusaha yang lebih besar. Disamping itu, seringkali pemerintah membuat kebijaksanaan yang tidak berpihak pada pengusaha kecil, pengusaha kecil seringkali di anaktirikan dalam hal pengadaan dan penambahan modal usaha pada dunia perbankan dibandingkan pengusaha besar maupun menengah.

Dalam kenyataannya pengusaha kecil justru dapat bertahan dan bahkan tidak sedikit yang berkembang dimasa krisis jika dibandingkan dengan pengusaha menengah dan besar. Kenyataan ini karena pengusaha kecil secara umum yang justru bersentuhan langsung dengan masyarakat baik dalam proses produksi maupun distribusi hingga konsumsi. Sekalipun demikian, pengusaha kecil juga memiliki berbagai macam permasalahan yang mendasar, baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia dan teknologi serta iklim usaha yang belum mendukung.

Tambunan (1999: 56) menjelaskan bahwa dalam era perdagangan bebas dan globalisasi perekonomian dunia, setiap pelaku ekonomi nasional dari semua kelompok skala usaha (kecil, menengah maupun besar) di sektor industri manufakturing tidak punya pilihan lain selain harus mempersiapkan diri sejak dini untuk bisa menghadapi persaingan global yang pasti akan sangat ketat. Hal ini tidak hanya berlaku pada industri nasional yang berorientasi pada pasar ekspor, tetapi juga yang melayani pasar domestik, karena harus bersaing dengan produk-produk impor. Dalam konteks mikro dan organisasi, industri adalah sekelompok



perusahaan yang menghasilkan produk/ jasa yang relatif sejenis, atau yang memiliki sifat mengganti yang tinggi.

Usaha untuk meningkatkan produktivitas industri kecil dalam kondisi krisis yang berkepanjangan menjadi relatif lebih sulit untuk dilakukan mengingat permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Seringkali kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah lebih berpihak pada industri besar dan menengah padahal industri kecil yang lebih dapat bertahan dalam masa krisis seperti ini. Pemerintah terbukti lebih memproteksi dan memberikan perlindungan terhadap industri besar

Dalam konstelasi semacam ini, dapat dipahami mengapa terjadi dualisme dan lemahnya keterkaitan industri kecil dengan industri besar. Dualisme ini muncul karena orientasi industrialisasi berbasis pada modal besar dan teknologi tinggi namun, kurang berdasarkan kekuatan ekonomi rakyat. Pengalaman Taiwan sebagai perbandingan, justru menunjukkan bahwa perekonomiannya dapat tumbuh pesat karena ditopang oleh sejumlah usaha kecil dan menengah yang disebut *Community based industry*. Perkembangan industri modern di Taiwan, yang sukses menembus pasar global, ternyata ditopang oleh kontribusi usaha kecil dan menengah yang dinamik. Keterkaitan yang erat antara industri besar dan industri kecil melalui program *subcontracting* terbukti mampu menciptakan sinergi yang menopang perekonomian Taiwan. Industri besar di Taiwan selalu bekerja sama dengan industri kecil dengan memberikan order pengerjaan barang maupun jasa kepada industri kecil. Keterkaitan yang erat antara industri besar dan industri kecil seperti yang terjadi di Taiwan seharusnya dapat diwujudkan di Indonesia karena terbukti industri kecil di Indonesia memiliki arti penting bagi perekonomian nasional tidak hanya sebagai salah satu sumber penting bagi peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan tetapi juga, secara potensial merupakan motor utama penggerak pertumbuhan ekspor manufaktur. Dengan demikian industri kecil dapat membantu usaha pemerintah selama ini untuk meningkatkan volume ekspor nasional non migas, yang berarti juga meningkatkan jumlah cadangan devisa. Selain itu industri kecil di Indonesia diharapkan dapat berperan sebagai industri penunjang yang tangguh seperti halnya di Taiwan, Korea Selatan dan Jepang bagi industri besar, sehingga meningkatkan

efisiensi dan juga tingkat daya saing global dari sektor industri manufaktur nasional.

Sejalan dengan arti penting industri kecil bagi perekonomian nasional, **Mudrajat Kuncoro** (1997: 312) menjelaskan alasan untuk menumbuhkembangkan industri kecil dan industri rumah tangga. Pertama, industri kecil menyerap banyak tenaga kerja, kecenderungan banyak menyerap tenaga kerja umumnya membuat industri kecil juga intensif dalam menggunakan sumber daya alam lokal. Apalagi karena lokasinya banyak di pedesaan, pertumbuhan industri kecil akan menimbulkan dampak positif bagi peningkatan jumlah tenaga kerja. Kedua, industri kecil memegang peranan penting dalam ekspor nonmigas dengan menempati ranking kedua setelah ekspor dari kelompok aneka industri.

Tambunan (1999: 118) mengungkapkan bahwa kekuatan dari industri kecil di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan. **Pertama**, industri kecil sangat padat karya dan persediaan tenaga kerja di Indonesia masih sangat banyak, mengikuti laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja rata-rata pertahun masih sangat tinggi. Sehingga upah nominal tenaga kerja, khususnya dari kelompok-kelompok berpendidikan rendah masih relatif murah dibandingkan dinegara asia tenggara lainnya. **Kedua**, industri kecil di Indonesia masih banyak membuat produk-produk sederhana yang tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal yang tinggi; melainkan keahlian khusus yang dapat dimiliki warga setempat lewat sumber-sumber informal (*traditional skill*). **Ketiga**, banyak industri kecil yang membuat produk-produk yang bernuansa kultur seperti ukir-ukiran dari kayu yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat dimasing-masing daerah. Hanya saja kelemahan pengusaha industri kecil tersebut adalah tidak membuat hak cipta terhadap produk-produk mereka, dan tidak melakukan banyak inovasi baik dalam proses pembuatan maupun dalam desain sehingga produk-produk mereka mudah ditiru oleh orang asing dengan kualitas dan desain yang lebih baik dan memiliki hak cipta.

Kemampuan industri kecil di Indonesia untuk mampu menembus pasar global atau meningkatkan ekspor atau menghadapi produk-produk impor di pasar

domestik ditentukan oleh suatu kombinasi antara sejumlah faktor keunggulan relatif yang dimilikinya terhadap pesaing-pesaingnya. Dalam konteks ekonomi internasional pengertian daripada keunggulan relatif dapat didekati dengan pendekatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Dengan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif pengusaha kecil di Indonesia yang tersebar di daerah-daerah mampu untuk terus tumbuh dan berkembang. Keunggulan absolut atau komparatif adalah bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi dan ekspor terhadap suatu jenis barang tertentu dimana negara tersebut memiliki keunggulan absolut atau komparatif dan tidak memproduksi atau melakukan impor terhadap jenis barang lain dimana negara tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif atau absolut terhadap negara lain yang memproduksi barang sejenis. Sedangkan keunggulan kompetitif adalah kemampuan suatu negara bersaing memasarkan barang yang juga diproduksi oleh negara lain di pasar internasional

Untuk mewujudkan bentuk perekonomian yang ideal berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan dukungan dari pemerintah untuk lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari program-program pengembangan dan penyediaan fasilitas untuk menumbuhkembangkan industri kecil. Dalam jurnal yang berjudul prospek otonomi luas, **Ryaas Rasyid (2001: 56)** mengungkapkan bahwa inti dari pelaksanaan otonomi adalah terdapatnya keleluasaan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran serta aktif dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Dengan otonomi daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kepentingan dan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah yang luas dan nyata, maka pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan segala potensi yang ada di daerahnya termasuk industri kecil untuk lebih dikembangkan untuk menyongsong era perdagangan bebas.

Pengusaha kecil merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja dan banyak menyerap tenaga kerja. Diharapkan kegiatan usaha ini mampu memberikan pekerjaan bagi golongan ekonomi lemah dan pengangguran, sehingga banyaknya pengangguran akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjang-

an dapat berkurang jumlahnya. Ini merupakan sasaran penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa pengusaha kecil belum banyak berkiprah dalam mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian regional, hal ini disebabkan pengusaha kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia (SDM) dan teknologi serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.

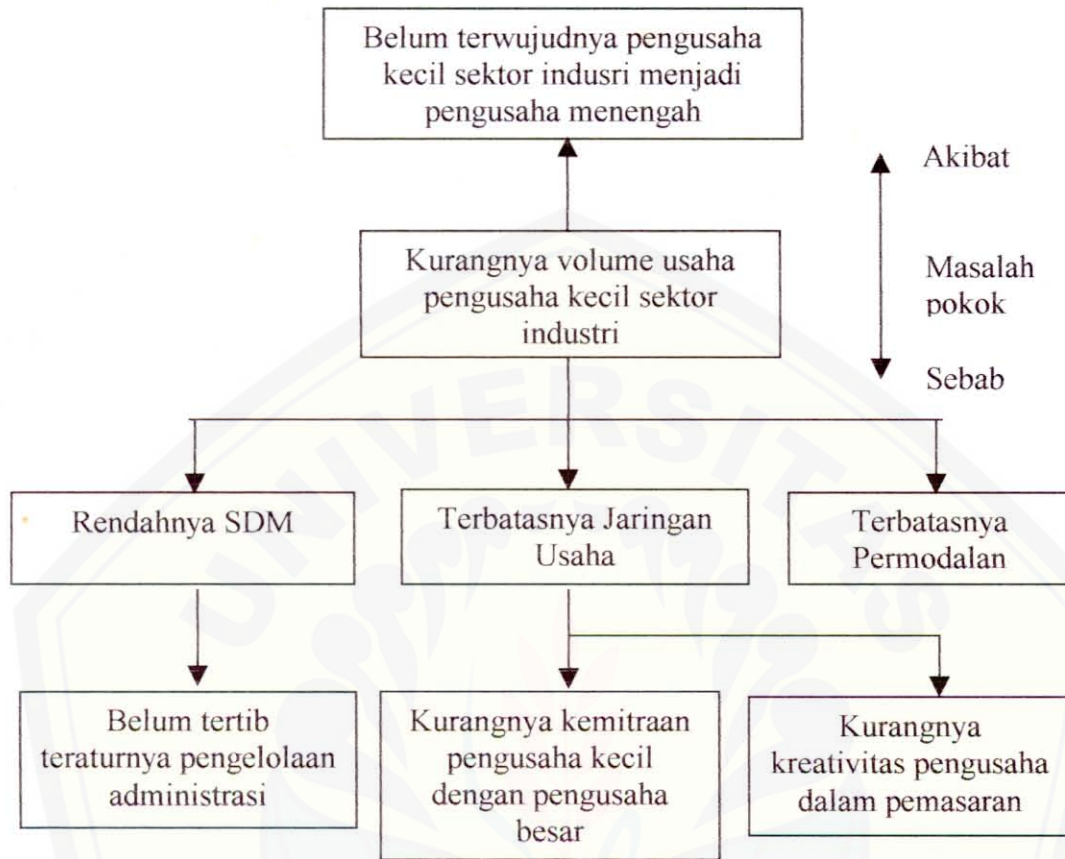
Di kabupaten Sidoarjo, pengusaha kecil memiliki potensi yang cukup besar untuk di kembangkan, terutama perajin tas dan koper yang ada di Tanggulangin. Perajin tas dan koper yang tergabung dalam koperasi INTAKO sudah cukup dikenal masyarakat luas. Mereka mampu memproduksi tas dan koper dengan kualitas maupun kuantitas yang dapat diandalkan. Industri kecil yang ada sejak tahun 1970 an, terbukti mampu menyerap tenaga kerja yang banyak dan mampu meningkatkan taraf hidup pengusaha dan penduduk sekitarnya.

Melihat fenomena di atas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan pembinaan melalui Dinas Koperasi dan PKM agar perajin tas koper yang ada dapat lebih berkembang dan dapat menjadi produk unggulan kabupaten Sidoarjo. Setelah dilaksanakannya pengidentifikasian terhadap hambatan dan kendala yang di hadapi oleh perajin tas dan koper di Tanggulangin maka dapat di ketahui penyebab dari permasalahan yang ada adalah:

1. Rendahnya kualitas sumber daya yang ada khususnya pemilik usaha kerajinan tas dan koper dalam mengelola usahanya.
2. Terbatasnya jaringan usaha yang menyulitkan perajin tas dan koper untuk memasarkan produknya secara luas.
3. Terbatasnya permodalan yang membuat perajin tas dan koper meningkatkan kulitas dan kualitas produksinya mengingat semakin mahalnya biaya produksi yang dibutuhkan.

Adapun berbagai permasalahan pengusaha kecil dapat digambarkan dalam pohon masalah berikut ini :

Gambar I. Pohon Permasalahan Pengusaha Kecil



Sumber: Buku Rencana Kerja pengembangan pengusaha kecil (Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sidoarjo tahun 2001)

Keterangan :

Dari pohon masalah tersebut maka dapat diketahui secara jelas pokok permasalahannya yaitu :

1. Rendahnya Sumber Daya Manusia
2. Terbatasnya Jaringan Usaha
3. Terbatasnya permodalan

Dari permasalahan diatas, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk mewujudkan pembinaan dan pengembangan pengusaha kecil yaitu :

1. Keputusan Presiden RI no. 96 /m/ 1993, tentang pembentukan kabinet pembangunan VI, Departemen koperasi mendapat tugas baru, yakni disamping membina koperasi juga membina pengusaha kecil.
2. Pada era reformasi, terjadi perubahan struktur pemerintah dengan ditandai pembentukan kabinet reformasi pembangunan, Departemen koperasi dan pembinaan pengusaha kecil menjadi Depkop, pengusaha kecil dan menengah dan dalam kabinet persatuan menjadi menteri negara koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
3. Surat keputusan Menteri keuangan RI No. 316/Rmk.016/1994, tanggal 27 juni 1994 tentang pedoman pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
4. Undang-undang RI. No. 9 tahun 1995 tentang pembinaan usaha kecil yang dilakukan melalui :
 - a. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung bagi pengembangan usaha kecil
 - b. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil serta kemitraan usaha

Disamping berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dalam melaksanakan pembinaan usaha kecil berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Sehingga Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintah kabupaten dibidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah. Berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah dan dalam melaksanakan tugas teknis administrasi dibina dan dikordinasikan oleh sekretaris daerah.

Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan koperasi pengusaha kecil dan menengah di lingkungan pemerintah kabupaten berdasarkan kebijaksanaan kepala daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang

koperasi, pengusaha kecil dan menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu didalam Peraturan Daerah No. 14 tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Sidoarjo.

Dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut yang merupakan bagian dari pembinaan pengusaha kecil oleh dinas koperasi pengusaha kecil dan menengah terhadap perajin tas dan koper di Tanggulangin yang mendasari penulis untuk mendefinisikan judul penelitian yaitu :

“Hubungan Pembinaan yang Dilakukan oleh Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah terhadap peningkatan Produktivitas Perajin Tas dan Koper di Kecamatan Tanggulangin”

(Suatu studi tentang usaha peningkatan produktivitas pengusaha kecil yang yang bernaung dibawah binaan dinas koperasi dan pengusaha kecil menengah di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo)

1.2 Perumusan Masalah

Dalam kegiatan ilmiah selalu diawali dengan perumusan masalah yang jelas dan tegas, sehingga peneliti lebih mudah dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Masalah menurut Winarno Surachmad (1993:33) sebagai berikut:

“Masalah adalah setiap kesulitan untuk menggerakkan manusia untuk memecahkannya, masalah harus dapat dikatakan tantangan yang mesti dilalui (dengan jalan mengatasinya) apabila kita berjalan terus masalah akan tampak sebagai tantangan”.

Maka permasalahan yang hendak dimunculkan adalah “Adakah hubungan pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan produktivitas perajin tas dan koper di Tanggulangin”.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk:

1. Mengetahui kesesuaian antara organisasi dan program pembinaan oleh Dinas Koperasi dan PKM dengan produktivitas perajin tas dan koper.

2. Mengetahui sejauh mana hubungan pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan produktivitas perajin tas dan koper di Tanggulangin.

2.3.1. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar memperoleh manfaat sebagai berikut:

- 1) Diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan, serta berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehubungan dengan tema atau permasalahan dalam tulisan ini.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi pembinaan bagi industri kecil.

2.4. Kerangka Teori

Penulis menyadari bahwa setiap penelitian ilmiah diperlukan adanya pijakan teori dan konsep-konsep yang berfungsi sebagai pedoman atau landasan untuk menjelaskan secara sistematis substansi dari gejala-gejala yang menjadi obyek penelitian.

Sesuai pengertian teori menurut F.N. Kerlinger (dalam Singarimbun dan Effendi, 1989 : 37) menyatakan bahwa, "Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep-konsep."

Selanjutnya penulis mencoba menjabarkan konsep-konsep atau teori yang berkaitan dengan pembangunan, permasalahan organisasi, pembinaan usaha kecil, produktivitas dan pengusaha kecil yang menjadi landasan atau pokok bahasan utama dalam penelitian ini.

1.4.1 Konsep Organisasi

Organisasi merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan. Pengertian organisasi menurut Robbins (1994: 4) adalah, "Kesatuan

(entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan”.

Sedangkan pengertian organisasi menurut Suwarno Handyaningrat (1982: 42) adalah :

Sarana atau alat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu dikatakan bahwa organisasi adalah wadah kegiatan dari pada orang-orang yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan tersebut setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dengan kata kerjanya.

Kemudian menurut Sondang P. Siagian (dalam Kartini Kartono 1991 : 6) adalah :

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hierarki dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

1. Berdasarkan ketiga konsep organisasi tersebut, dapat dijelaskan bahwa organisasi adalah wadah atau tempat bagi sekelompok orang untuk kerja sama dalam usaha mencapai tujuan. Usaha pencapaian tujuan tersebut setiap organisasi akan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah sebagai sebuah organisasi di daerah berusaha untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu pembinaan usaha kecil yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 73 Tahun 2000 tentang perubahan Perda No. 27 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Jember.

2.4.1. Konsep Pembinaan Usaha Kecil.

Pembinaan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah : usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan berarti segala usaha, tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah

untuk membantu pengusaha kecil dalam membangun, mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya.

Sedangkan pembinaan menurut Miftah Thoha(1989 : 7) mengemukakan :
Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, sehingga pembinaan ini bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Dari konsep ini, fungsi dan tugas pembinaan usaha kecil oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dimaksudkan untuk perbaikan atas sesuatu, perbaikan tersebut adalah berupa peningkatan produktivitas pengusaha kecil.

Kemudian konsep pembinaan menurut Manullang (1986:21) mengemukakan :

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, subyek didik dengan tindakan pengarahan, bimbingan, pengembangan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Kegiatan pembinaan usaha kecil dapat diartikan sebagai kegiatan membimbing, pengarahan, pengembangan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah untuk mengarahkan pengusaha kecil pada sasaran yang akan dicapai.

Peran pembinaan usaha kecil oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah adalah membimbing dan mengarahkan pengusaha kecil untuk memperoleh pinjaman modal melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN , pengembangan jaringan usaha, dan pengembangan sumberdaya manusia dalam upaya untuk pemberdayaan pengusaha kecil dengan tujuan penyelamatan dan memulihkan pengusaha kecil yang terkena dampak krisis ekonomi serta meningkatkan produktivitas dan daya saing dengan pengusaha besar.

Pembinaan usaha kecil yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah adalah merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, sesuai dengan keputusan Bupati Sidoarjo No. 14 tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Koperasi dan pengusaha kecil menengah Kabupaten Sidoarjo yaitu :

◆ **Tugas Pokok Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah**

Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah di lingkungan pemerintah kabupaten berdasarkan kebijaksanaan kepala daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

◆ **Fungsi Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam tugas pokok diatas, Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijaksanaan operasional dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan koperasi.
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produktivitas usaha koperasi.
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan usaha pengusaha kecil dan menengah.
5. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pembiayaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta koperasi simpan pinjam.
6. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
7. Pelaksanaan evaluasi program dan pelaporan hasil-hasil pembinaan dan pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
8. Pelaksanaan tugas-tugas dan ketatausahaan.
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sidoarjo..

Kemudian berdasarkan keputusan menteri koperasi pengusaha kecil dan menengah Nomor 20 /Kep/M/I/1999 tanggal 25 januari 1999 tentang organisasi dan tata kerja kantor Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menengah. Dalam pelaksanaan operasional seksi Pengusaha Kecil dan Menengah mempedomani petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tersebut adalah :

1. Bimbingan Bantuan Permodalan

Untuk membimbing pengusaha kecil memperoleh pinjaman modal melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 316/Rmk.016/1994.

2. Pengembangan Jaringan Usaha

Pengembangan jaringan usaha dilakukan melalui kegiatan pameran usaha dan temu kemitraan antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar dengan tujuan untuk membantu pengusaha kecil dalam memasarkan produknya dan usaha untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar.

3. Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Pengembangan sumberdaya manusia dilakukan melalui pendidikan dan latihan ketrampilan bagi pengusaha kecil untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja pengusaha kecil dalam pengelolaan administrasi dan manajemen usaha agar lebih tertib dan disiplin dalam setiap pelaksanaan tugas pekerjaan.

Dari petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan diatas dan dikaitkan dengan konsep pembinaan yang berarti membimbing dan mengembangkan pengusaha kecil, maka pembinaan usaha kecil dilakukan dengan melalui :

1.4.2.1 Bimbingan Bantuan Permodalan

Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam rangka mendirikan, mengembangkan ataupun melanjutkan usaha adalah permodalan. Dalam mengatasi masalah permodalan ini ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu :

- 1). Sumber dana apa saja yang bisa diperoleh dari masyarakat
- 2). Siapa yang memiliki sumber dana tersebut
- 3). Bagaimana aturan permainan dari si pemilik modal yang bersangkutan

Dari ketiga hal tersebut harus dihubungkan dengan kemampuan dan kondisi yang ada, apakah sesuai dengan perencanaan atas laba yang diharapkan maupun likuiditas perusahaan.

Di dalam buku petunjuk bagi pengusaha kecil seluruh Indonesia tahun 1977, hal. 250 menyebutkan bentuk permodalan yang ada di masyarakat Indonesia adalah :

- 1). Modal dalam bentuk pinjaman atau kredit dari pihak luar
- 2). Modal dalam bentuk penyertaan modal saham, baik dalam rangka perluasan modal saham ataupun penggabungan perusahaan (merger)
- 3). Modal dari pihak lain dalam bentuk sumbangan, subsidi, grant dan sebagainya
- 4). Modal dalam bentuk kombinasi diantara ketiga bentuk yang telah disebutkan.

Pada umumnya perusahaan mendapat bantuan modal secara kredit atau pinjaman, partisipasi modal saham ataupun kombinasi diantara keduanya. Sedangkan bentuk sumbangan, subsidi, grant jarang sekali ada, kecuali bilamana perusahaan mempunyai relasi atau sponsor yang akan memberikan bantuan dalam bentuk tersebut.

Berikut ini gambaran singkat tentang ciri-ciri dari bantuan modal secara kredit dan penyertaan modal saham.

Tabel VI Ciri-ciri bantuan modal secara kredit dan penyertaan modal saham

Ciri-ciri	Modal secara kredit atau pinjaman	Modal dengan partisipasi modal saham
1. Cara pengembalian	Dilakukan secara berangsur sesuai dengan jadual kredit	Dilakukan dengan cara jual-beli saham
2. Pembebanan biaya dan resiko penanaman dana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dengan dikenakan bunga atas modal yang di pinjamkan ➤ Adanya agunan atas modal yang di pinjamkan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembebanan atas pembagian laba perusahaan dalam bentuk deviden ➤ Adanya harapan atas kenaikan kurs saham pada saat jual-beli saham

3. Keuntungan bagi penerima modal	Tidak merupakan pemilikan atas saham, sehingga pengusaha tetap menjadi pemilik penuh	<ul style="list-style-type: none">➤ Tidak adanya beban bunga➤ Tidak diperlukan agunan➤ Adanya partner usaha yang baru yang diharapkan dapat memperkuat manajemen perusahaan
-----------------------------------	--	---

Sumber : Petunjuk bagi pengusaha kecil seluruh Indonesia tahun 1977, hal 251

Dari gambaran diatas kalangan pengusaha kecil diharapkan untuk memilih bentuk modal yang mana disesuaikan dengan kondisi dan kemampuannya.

Sedangkan lembaga yang bisa memberikan bantuan permodalan yaitu :

- 1). Lembaga perbankan : khusus untuk bantuan modal jangka pendek, menengah dan panjang
- 2). Lembaga keuangan bukan bank : dapat memberikan bantuan modal baik dalam bentuk pinjaman modal maupun dalam bentuk penyertaan modal saham
- 3). Pemilik modal lainnya baik secara perorangan maupun secara perusahaan yang berminat untuk memberikan bantuan permodalan.

Pihak Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah berusaha membimbing untuk memperoleh bantuan permodalan. Arti bimbingan menurut Moekiyat(1989:121) yaitu :

Bimbingan adalah pemberian petunjuk atau penjelasan tentang cara-cara pelaksanaan dari suatu pekerjaan atau ketentuan peraturan perundangan dengan maksud agar terdapat kesatuan tindakan atau kegiatan tentang bidang yang sama dan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

Jadi bimbingan berarti pemberian petunjuk dan penjelasan tentang cara-cara memperoleh bantuan modal oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah. Bantuan permodalan tersebut diperoleh melalui pemanfaatan dana dari

bagian laba BUMN. Di dalam buku petunjuk bagi pengusaha kecil seluruh Indonesia (1977:252) : "Bimbingan bantuan permodalan dilakukan untuk memudahkan dan menimbulkan kelancaran pemberian modal serta menjadikan kondisi permodalan yang lebih baik."

1.4.2.2 Pengembangan Jaringan Usaha

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia (1988:352) : "Jaringan adalah bagan yang menggambarkan tali-temali kegiatan di dalam suatu proyek atau kegiatan." Dengan demikian jaringan usaha dapat diartikan sebagai hubungan yang berkaitan antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain dalam suatu kegiatan tertentu.

Sedangkan di dalam buku Rencana Kerja Terwujudnya Peningkatan Temu Kemitraan antara Pengusaha Kecil, Menengah dengan Pengusaha Besar oleh Seksi Pengusaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Sidoarjo (2001: 10)

Jaringan usaha yang belum mantap sehingga berpengaruh pada volume usaha yang berkurang, akibatnya belum terwujudnya pengusaha kecil sektor industri menjadi pengusaha menengah dikarenakan kurangnya kemitraan antara pengusaha kecil sektor industri dengan pengusaha besar, kurangnya motivasi dan kreativitas pengusaha dan belum tertib teraturnya pengelolaan administrasi.

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa jaringan usaha pengusaha kecil secara umum masih belum mantap, jaringan usaha memegang peranan sangat penting karena maju mundurnya usaha tergantung pada jaringan usaha pengusaha kecil dengan pengusaha besar ataupun dengan pengusaha kecil lainnya. Pengembangan jaringan usaha dilakukan dengan melalui :

1). Membangun Sistem Pemasaran

Menurut Kotler, P & Armstrong, G (1997:12) menyatakan :

Pemasaran berarti menata ulang (managing) pasar untuk menghasilkan pertukaran dengan tujuan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran sebagai suatu proses tempat individu dan kelompok memperoleh

apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan orang lain.

Dari pengertian diatas pihak pengusaha kecil sebagai pihak produsen harus mampu untuk menata ulang (managing) pasar dalam upaya memasarkan produknya untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan manusia.

Kemudian menurut Philip Kotler (1980 : 31) menyatakan :

Konsep pemasaran adalah suatu fenomena yang beranggapan bahwa penentuan kebutuhan dan keinginan konsumen yang menjadi sasaran penjualan, merupakan tugas utama dari perusahaan, dan bahwa perusahaan harus menjalankan usaha pemasarannya sedemikian rupa sehingga dapat menyampaikan kepuasan yang diinginkan para konsumen dengan cara yang lebih efektif dan lebih efisien daripada perusahaan saingan.

Dalam perusahaan yang menganut konsep pemasaran, semua fungsi yang ada sangkut-pautnya dengan kegiatan pemasaran, pengawasan persediaan, pengangkutan, penggudangan, penjualan, distribusi fisik, penentuan harga, pengiklanan, penelitian pasar dan sebagainya dikordinasikan dan dipadu dibawa pengawasan seorang manajer.

Penerapan konsep pemasaran memerlukan adanya perencanaan seksama, penyusunan strategi dan penggunaan teknik-teknik pemecahan masalah secara ilmiah. Segala kegiatan harus dipusatkan pada usaha pengembangan strategi penentuan sasaran dan pemilihan cara-cara pencapaiannya. sesuai dengan konsep pemasaran menurut Drs. Radiosunu (1982 : 31) menyatakan :

Pemasaran adalah suatu sistem kegiatan usaha yang terpadu, untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli, guna mendapatkan volume penjualan yang menghasilkan laba.

Pihak pengusaha kecil sebagai produsen harus memiliki seorang manajer yang berkualitas dalam mengkordinasikan kegiatan pemasaran dan mampu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli.

Namun pada pengusaha kecil, belum memiliki manajer yang tangguh dan rencana-rencana strategis untuk memuaskan konsumen. Oleh karena itu pihak

Dinas koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah berusaha membantu dengan memfasilitasi untuk membangun sistem pemasaran. Membangun sistem pemasaran berarti membantu memasarkan barang produksi pengusaha kecil dengan melalui kegiatan pameran usaha dalam rangka peningkatan produktivitas pengusaha kecil.

2). *Membangun Kemitraan Antara Pengusaha Kecil dengan Pengusaha Besar.*

Membangun kemitraan berarti membangun kerjasama yang baik antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar. Sesuai dengan konsep kemitraan menurut UU. RI NO. 9/1995 tentang usaha kecil (1995:10) yaitu : "Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan."

Dalam mewujudkan kerjasama yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan tersebut dilakukan temu usaha, yaitu : pertemuan secara langsung pada suatu tempat antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar yang membahas tentang keberhasilan usaha dan pembinaan oleh pengusaha besar terhadap pengusaha kecil.

Tugas Dinas koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dalam hal ini yaitu memfasilitasi untuk mengadakan temu kemitraan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dalam rangka peningkatan usaha yang lebih maju untuk meningkatkan produktivitas pengusaha kecil.

1.4.2.3 Pengembangan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia memegang peranan sangat penting dalam setiap industri. Dengan SDM yang bagus maka akan tercapai suatu sistem kerja yang baik dan mantap, setiap orang akan bekerja secara profesional, manajemen dan pengelolaan administrasi akan berjalan dengan baik sehingga output atau hasil produksi menjadi lebih berkualitas dan bertambah banyak.

Program pengembangan sumber daya manusia ditujukan kepada pengusaha kecil yang memerlukan pendidikan dan latihan untuk menambah

pengetahuan dan ketrampilan dalam mengatur dan memperbaiki manajemen produksinya. Pengertian pengembangan menurut : Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Husnan (1999 : 77) adalah sebagai berikut :

Usaha-usaha untuk meningkatkan ketrampilan maupun pengetahuan umum bagi karyawan agar pelaksanaan pencapaian tujuan lebih efisien. Pengembangan ini mencakup pengertian pendidikan dan latihan yaitu sebagai sarana peningkatan ketrampilan dan pengetahuan umum bagi karyawan.

Sedangkan menurut Domi C. Matutina, dkk (1993 : 103)
Pengembangan adalah :

Suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan kecakapan dan perilaku pegawai yang sesuai dengan bidang tugas dan kedudukannya sebagai pegawai. Salah satu upaya untuk mengembangkan pengetahuan pegawai adalah pendidikan dan latihan.

Program pengembangan sumber daya manusia terhadap pegawai dalam teori diatas dimaksudkan kepada karyawan-karyawan dalam industri kecil yang tujuannya adalah meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan sikap karyawan. Bentuk dari usaha pengembangan sumber daya manusia adalah pendidikan dan latihan. Sedangkan tujuan dari pendidikan dan latihan adalah membantu pegawai melaksanakan tugas dengan baik. Sesuai yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko (1998: 103) sebagai berikut: "Pendidikan dan latihan membantu pegawai dalam menghindarkan diri dari keusangan dan melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik."

Sehubungan dengan hal diatas Susilo Martoyo (2000: 64) menyatakan: "Sasaran-sasaran pendidikan dan latihan tersebut mencerminkan perilaku kondisi yang diinginkan dan berfungsi sebagai standar-standar dengan mana prestasi kerja individual dan efektivitas program dapat diukur. "

Berkaitan dengan pendapat diatas Abi Sujak (1987 : 67) mengemukakan pendapatnya mengenai pendidikan dan latihan sebagai berikut:

Pendidikan dan latihan adalah pemberian pengajaran, ketrampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas –

tugas atau pekerjaan dan untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai dengan tugas-tugas atau pekerjaannya yang pada saat ini menjadi tanggung jawabnya.

Dari pendapat diatas maka disimpulkan bahwa pendidikan dan latihan merupakan program pemberian ketrampilan dan pengetahuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang dibebankan pada pegawai dan untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai.

- Pihak Dinas koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dalam hal ini melaksanakan program pendidikan dan latihan ketrampilan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja pengusaha kecil agar lebih tertib dan disiplin dalam setiap pelaksanaan tugas pekerjaan dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas pengusaha kecil.

Pembinaan suatu industri di wilayah pedesaan dirasa perlu untuk dilakukan dan dikembangkan. Industrialisasi pedesaan ini mengandung arti dinamis dan keterkaitan. Secara dinamis industrialisasi pedesaan mengandung arti pengembangan industri baik secara horisontal, vertikal dan berkesinambungan di wilayah pedesaan. Perkembangan industri secara horisontal adalah diversifikasi industri dalam rangkaian dan perhubungan melalui input-output (Todaro, 1989:132). Berdasarkan pengertian diatas maka jenis industri yang dapat dikembangkan untuk industrialisasi pedesaan haruslah berkemampuan tinggi untuk mendorong perkembangan industri lainnya baik secara vertikal maupun horisontal. Hal ini berarti bahwa industri tersebut haruslah mampu menjadi mesin penggerak perkembangan perekonomian desa. Adapun beberapa syarat (ciri) yang harus dimiliki agar suatu industri dapat bertindak sebagai penggerak industrialisasi di pedesaan adalah (Lemlit Unej 1996); 1) mempunyai kaitan input-output yang tinggi dengan industri lainnya, 2) nilai tambah yang dihasilkan diterima oleh penduduk pedesaan, 3) padat tenaga kerja, 4) produk industri yang dikembangkan tersebut dikonsumsi oleh penduduk desa dengan elastisitas permintaan yang tinggi. Industri tersebut dapat dikatakan sebagai industri kunci karena industri ini sebagai mesin penggerak utama/dominan berperan dalam perkembangan industri sekitarnya, yang pada akhirnya dapat mendukung dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya. Untuk mewujudkan

profil industri kecil sebagaimana yang dijelaskan diatas maka perlu dilakukan pembinaan terhadap pengusaha kecil termasuk perajin tas dan koper di Tanggulangin.

Menurut **Miftah Toha** (1993:7) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.

Sedangkan menurut **Manullang** (1986:21) pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar terencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan subyek didik dengan tindakan pengarah, bimbingan, pengembangan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Undang-Undang No. 9/1995 ada dua pendekatan utama dalam pemberdayaan usaha kecil yaitu penciptaan iklim usaha dan melalui pembinaan serta pengembangan. Pembinaan serta pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pembinaan dan pengembangan dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM dan teknologi.

Peran pembinaan usaha kecil oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah adalah membimbing dan mengarahkan pengusaha kecil untuk memperoleh pinjaman modal melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, pengembangan jaringan usaha, dan pengembangan sumberdaya manusia dalam upaya untuk pemberdayaan pengusaha kecil dengan tujuan penyelamatan dan memulihkan pengusaha kecil yang terkena dampak krisis ekonomi serta meningkatkan produktivitas dan daya saing dengan pengusaha besar.

2.4.2. Konsep Produktivitas

Menurut Manullang (1980:103) pengukuran produktivitas dapat dilihat dari aspek:

1. Production, yakni jumlah produk yang dihasilkan
2. Production time required to do job, yakni lamanya suatu unit produk dihasilkan.
3. Decrease industri breaking, yakni berkurangnya kerusakan dari produk yang dihasilkan.
4. Increase learning rate, yaitu kenaikan pendapatan sebagai akibat naiknya barang yang dihasilkan.

Jadi produktivitas usaha merupakan kemampuan perajin dalam usaha menghasilkan produk yang lebih baik atau lebih meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Pengukuran produktivitas ini merupakan suatu alat manajemen yang penting disemua kegiatan ekonomi dan menjadi patokan bagi peningkatan di waktu yang akan datang. Untuk itu sebagai indikator produktivitas meliputi:

1. Jumlah produk yang dihasilkan

Produksi adalah jumlah barang yang dihasilkan oleh perajin. Menurut Swastha dan Sukotjo (1982:280) produksi berarti “pengubahan bahan-bahan dari sumber-sumber menjadi hasil yang diwujudkan oleh produsen, hal itu dapat berupa barang dan jasa”. Kapasitas produksi yang dihasilkan oleh para perajin tergantung pada kapasitas dan kesediaan mereka dalam membuat suatu produk. Selanjutnya Winardi mengemukakan (1967:16) bahwa:

Hasil produksi kemampuan kerja manusia yang digunakan pertama-tama tergantung pada kesediaan bekerja dan kapasitas kerja pekerja individual dan disamping itu tergantung pula dari proporsionalitas dengan apa kemampuan tersebut digunakan dalam kombinasi dengan produksi lain.

Untuk mengetahui produktivitas usaha dapat diukur dari seberapa banyak tas dan koper yang dapat dihasilkan oleh seorang perajin selama sehari untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan yang ditetapkan. Hal ini diperlukan ketrampilan atau teknik yang baik dari perajin.

3. Lamanya suatu unit produk dihasilkan

Lamanya suatu unit produksi yang dihasilkan didasarkan pada posisi standar waktu tertentu yaitu sehari, karena mereka berusaha dan memperoleh

pendapatan dalam jangka waktu sehari. Dalam menentukan berapa lama tingkat keluaran yang harus direncanakan sebelumnya mungkin untuk membuat suatu produk membutuhkan waktu yang lama atau mungkin hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat. Menurut Sinungan (1992:149) bahwa:

Seorang dinyatakan trampil dan produktif apabila yang bersangkutan dalam satuan waktu tertentu dapat menyelesaikan sejumlah hasil tertentu dapat menyelesaikan sejumlah hasil tertentu. dengan demikian menjadi faktor penentu suatu keberhasilan dan produktivitas, karena dari waktu itulah dapat dimunculkan kecepatan dan percepatan yang akan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan kehidupan.

Dalam proses pembuatan produk tentu seorang harus bisa menggunakan waktu yang seefisien mungkin mungkin, sehingga bisa lebih produktif lagi. Jadi penggunaan waktu yang efisien memberikan petunjuk yang jelas bagi pengukuran produktivitas usaha perajin tas dan koper.

4. Berkurangnya kerusakan dari produk yang dihasilkan

Bila kita berbicara masalah kerusakan, ini berarti membahas produk yang bersangkutan. maksud dari kualitas disini adalah sesuatu yang bernilai atau yang bermutu tinggi. Menurut Swastha dan Sukotjo (1982:27) "pengertian kualitas terletak pada faktor standart yang telah ditentukan oleh seseorang dengan tinjauan dari dimensi tertentu, misalnya komposisi bahan baku, kekerasan, kekuatan, ketepatan ukuran, dan beberapa faktor lain yang bersifat subyektif". Pengendalian mutu selau bertujuan untuk menghasilkan barang tanpa cacat (kerusakan) sehingga akan dikagumi oleh konsumen. Jadi produktivitas perajin dapat dilihat dari semakin meningkatnya kualitas produk yang dihasilkannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan sekaligus memuaskan konsumen.

4. Kenaikan pendapatan sebagai akibat naiknya barang yang dihasilkan.

Produktivitas yang meningkat yaitu output atau jumlah produk yang lebih banyak dan lebih baik dihasilkan dalam sehari, yang merupakan peningkatan bagi pendapatannya. Pengrajin dikatakan mempunyai produktivitas usaha apabila terjadi kenaikan pendapatan sebagai akibat meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan dan sedikitnya biaya yang dikeluarkan. Semakin banyak dan bermutu

produk yang dihasilkan maka akan semakin digemari oleh konsumen sehingga hal ini akan menambah pendapatan perajin. Dalam pengukuran produksi kenaikan pendapatan tidaklah hanya dilihat dari naiknya jumlah barang yang dihasilkan secara fisik, hal ini sesuai dengan pendapat Sinungan (1992:102) bahwa:

Produksi berkaitan dengan jumlah hasil (produk) yang dicapai, sedangkan produktivitas berkaitan dengan cara pencapaian tingkat produksi tersebut. Dengan penggunaan sumber-sumber daya secara lebih efektif dan efisien, produktivitas dapat ditingkatkan.

Sedangkan produktivitas dapat ditingkatkan menjadi empat kelompok, seperti yang diungkapkan oleh Kussriyanto (1991:2-3) yaitu :

- a. Pengurangan sedikit sumber daya untuk memperoleh jumlah produksi yang sama.
- b. Pengurangan sumber daya sekedarnya untuk memperoleh jumlah produksi yang lebih besar.
- c. Penggunaan jumlah sumber daya yang sama untuk memperoleh jumlah produksi yang lebih besar.
- d. Penggunaan jumlah sumber daya yang lebih besar untuk memperoleh produksi yang lebih besar lagi.

Jadi kenaikan pendapatan yang diperoleh perajin tas dan koper adalah merupakan porsi penghasilan dari meningkatnya jumlah produksi yang dihasilkan. Disamping itu kenaikan pendapatan tersebut sebagai kontribusi dari adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas yang dicerminkan pada rendahnya tingkat biaya yang harus dikeluarkan oleh pengrajin dalam melakukan promosi.

1.4.4. Konsep Pengusaha Kecil

Pengusaha kecil menurut Drs. Radius Prawiro (1977: 37) menyatakan bahwa pengertian pengusaha kecil ada dua yaitu :

1. Pengusaha kecil adalah organisasi atau badan usaha yang karena terbatasnya kemampuan mengelola dan berorganisasi, modal serta ketrampilan, hanya mampu melaksanakan kegiatan usaha di bidang

tertentu dan dengan volume yang sesuai dengan kemampuannya itu. Pengertian ini mengandung makna dinamis, dalam arti bahwa apabila kemampuan mengelola dan berorganisasi, modal serta ketrampilan itu bertambah besar, maka organisasi atau badan usaha tersebut akan melakukan usaha dibidang dan volume usaha yang lebih luas.

2. Pengusaha kecil adalah organisasi atau badan usaha yang karena sifat bidang dan volume usahanya memang hanya memerlukan kemampuan mengelola dan berorganisasi, modal, serta ketrampilan dalam ukuran kecil saja. Pengertian ini mengandung makna statis dalam arti bahwa kebutuhan akan ketrampilan, modal, serta sarana sudah ditentukan oleh sifat bidang dan volume usaha yang memang kecil itu.

Dari kedua pengertian pengusaha kecil tersebut, pembinaan dan pengembangan pengusaha kecil dalam ruang lingkup makna dinamis, karena permasalahannya lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan yakni untuk mewujudkan rencana pembangunan itu diperlukan pengusaha-pengusaha potensial dan terampil dalam melaksanakan pembangunan.

Menurut Bustiner dalam sukanti nirbito (2000:42) konsep perusahaan kecil di amerika yang berlaku sejak tahun 1953 sampai sekarang adalah : jika itu usaha eceran, penjualan tahunan lebih kecil dari \$5.000.000,00 (sampai \$ 15.000.000 dalam industri tertentu)

Pengusaha kecil dalam melakukan usahanya sifatnya terbatas (kecil) sesuai dengan UU RI No. 9 / 1995, Tentang usaha kecil, (1995 : 12) yaitu:

Usaha kecil adalah : Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut :

1. Mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dalam melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha kecil yang memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Omzet.

Mempunyai hasil penjualan /omzet paling banyak RP. 1.000.000.000,00 /tahun(satu milyar rupiah).

2. Asset Meningkatkan.

Perkembangan asset atau nilai kekayaan 2 tahun berturut-turut meningkat dan paling banyak RP. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3. Surat Ijin yang dimiliki.

Telah memiliki perijinan dan domisili yang jelas.

4. Kepastian Pasar.

Memiliki pelanggan atau konsumen yang rutin membeli produk.

5. Tenaga Kerja.

Minimal memiliki 3 orang tenaga kerja.

6. Memiliki Buku Catatan Administrasi.

Ada/tidak adanya catatan administrasi sederhana.

7. Minimal 2 Tahun telah Menjalankan Usahanya.

Untuk mengukur katanggihan/keuletan berusaha.

Pengusaha kecil memiliki kegiatan atau volume usaha yang kecil serta memiliki kekayaan yang terbatas. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan pengusaha kecil agar menjadi pengusaha yang lebih mandiri dan berkembang. Dengan kemandirian dan berkembangnya usaha pengusaha kecil maka akan tercapai pembangunan ekonomi yang mantap, tercapainya peningkatan produk nasional, munculnya kesempatan kerja yang besar, pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat.

1.5. Hipotesis

Hipotesis menurut Winarno Surachman (1994:68) sebagai berikut:

“Hipotesis adalah suatu kesimpulan, tetapi belum final, masih diperlukan dibuktikan kebenarannya. Hipotesis adalah dugaan sementara yang dianggap benar kemungkinan untuk menjadi jawaban yang benar”.

Dengan berlandaskan konsepsi dasar diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut

1. Ho : tidak ada hubungan antara pembinaan yang dilakukan oleh dinas koperasi dan PKM dengan produktifitas perajin tas dan koper di Tanggulangin.
2. H1 : ada hubungan antara pembinaan yang dilakukan oleh dinas koperasi dan PKM dengan produktifitas perajin tas dan koper di Tanggulangin.

1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk dalam pengukuran variabel. Dari teori-teori yang ada harus diterapkan atau dioperasionalisasikan dengan mudah dan jelas. Penulis perlu menjabarkan pengertian, penentuan standar pengukuran dan penganalisaan konsep tertentu dari konsep yang ada.

Kuntjoroningrat mengatakan definisi operasional tidak lain daripada mengubah konsep yang berupa konstruk itu, dengan kata-kata yang membenarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat diuji serta dapat ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Dengan demikian operasionalisasi adalah proses perincian referensi empiris suatu konsep atau variabel yang menjadi indikator-indikatornya. Lebih lanjut operasionalisasi dari masing-masing variabel yang ada dalam penulisan ini diuraikan:

1. variabel X = pembinaan dinas koperasi dan PKM
2. variabel Y= produktifitas perajin tas dan koper

1.6.1. Operasionalisasi Variabel Pembinaan Dinas Koperasi dan PKM (X)

Pembinaan yang dilakukan dinas koperasi melalui program-program yang telah dilaksanakan dan dijadikan sebagai indikator oleh penulis adalah :

1.6.1.1. penguatan akses untuk permodalan (X1)

Pihak Dinas koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (Seksi PKM) berfungsi sebagai pembimbing untuk memperoleh bantuan permodalan. Dinas

Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah berusaha mencari pinjaman modal melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Bimbingan bantuan permodalan menunjukkan usaha untuk memudahkan dan menimbulkan kelancaran pemberian modal serta kondisi permodalan yang lebih baik. Modal disini dikategorikan menjadi dua yaitu : pinjaman atau kredit dan partisipasi modal saham.

Untuk mengukur bimbingan bantuan permodalan dengan melalui :

1. Kemudahan untuk mendapatkan bantuan modal
2. Kelancaran kredit yang dikucurkan
3. Kondisi permodalan menjadi lebih baik

1.6.1.2. Pengembangan Jaringan Usaha (X2)

Pihak Dinas koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah memfasilitasi untuk mengembangkan jaringan usaha dengan melalui :

1. Membangun sistem pemasaran.

Membangun sistem pemasaran menunjukkan membantu memasarkan barang produksi pengusaha kecil dengan melalui pameran usaha. Untuk mengukur membangun sistem pemasaran dengan melalui :

- * kegiatan pameran usaha.
2. Membangun kemitraan antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar.
Membangun kemitraan menunjukkan kerjasama usaha antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dalam rangka peningkatan usaha yang lebih maju. Untuk mengukur membangun kemitraan dengan melalui :
 - a. Kegiatan untuk melakukan temu kemitraan
 - b. Tingkat kemajuan usaha setelah dilakukan kemitraan

1.6.1.3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (X3)

Pihak Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia bagi perajin tas dan koper (pengusaha kecil) dengan melalui :

- * Pendidikan dan latihan ketrampilan.

Pendidikan dan latihan ketrampilan adalah pemberian pengajaran, ketrampilan, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan dan untuk meningkatkan produktivitas dengan tugas-tugas atau pekerjaannya yang pada saat ini menjadi tanggungjawabnya. Pendidikan dan latihan ketrampilan diukur dengan melalui :

1. Peningkatan pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan.
2. Peningkatan ketrampilan perajin.

1.6.2. Operasionalisasi Variabel Produktifitas Pengusaha Tas dan Koper (Y)

1.6.2.1. Production, yakni jumlah produk yang dihasilkan (Y1)

1.6.2.2. Production time required to do job, yakni lamanya suatu unit produk dihasilkan. (Y2)

1.6.2.3. Increase learning rate, yakni kenaikan pendapatan sebagai akibat naiknya barang yang dihasilkan.(Y3)

1.6.2.4. Decrease industri breaking, yakni berkurangnya kerusakan dari produk yang dihasilkan.(Y4)

Untuk dapat mengukur data-data yang diperoleh terhadap item-item diatas maka kriteria penelitian sebagai berikut :

1. Skor **2** untuk responden yang menjawab **ya**
2. Skor **1** untuk responden yang menjawab **tidak**

Dari hasil skor jawaban responden, maka nantinya akan dianalisa kedalam analisa kuantitatif atau analisa statistik, sehingga dapat diketahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel yang telah penulis jelaskan dimuka.

1.7 Metodologi Penelitian

Metode Penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah yang harus dilakukan dengan cara-cara dan langkah yang benar sesuai dengan ketentuan penelitian yang berlaku. Untuk itu metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup :

1. Penentuan populasi
2. Metode Penentuan Sample
3. Metode Pengumpulan Data
4. Metode Analisa Data

1.7.1 Penentuan Populasi

Sebelum mengadakan penelitian terlebih dahulu peneliti menentukan populasi yang akan diteliti. Menurut Singarimbun dan Effendi (1989:152) bahwa, “populasi atau universe ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga.” Sedangkan menurut Arikunto (1993:102) mengatakan bahwa “populasi adalah keseluruhan obyek penelitian”.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh perajin tas dan koper di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang dibina oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah yang dalam hal ini adalah anggota koperasi Intako.

1.7.2 Metode Penentuan Sample

Setelah menentukan populasi, maka ditetapkan sampel untuk penelitian. Menurut Wasito (1990:54), bahwa :

“Sampel merupakan bagian populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Artinya sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi”

Pengambilan sampel atas responden dilakukan dengan teknik Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel dengan menerapkan atau mengajukan syarat-syarat tertentu agar suatu sampel dapat dipilih. Syarat yang diajukan agar sampel dapat dipilih dalam penelitian ini adalah individu-individu yang diperkirakan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan, dalam hal ini pengusaha tas dan koper. Jumlah sampel yang diambil adalah 30 reponden yang dianggap mewakili seluruh populasi yang ada.

Pertimbangan ini didukung oleh pendapat Arsyad dan Soeratno (1993:156) yang menyatakan bahwa :

“Dalam penentuan jumlah sampel sebenarnya tidak ada aturan yang tegas dan disyaratkan untuk suatu penelitian dari populasi yang tersedia. Namun demikian mutu dari suatu penelitian tidak terutama sekali ditentukan oleh besarnya sampel, akan tetapi kokohnya dasar-dasar teori, rancangan penelitian serta mutu pengolahan dan pelaksanaannya. Jumlah sampel juga tergantung dari faktor-faktor lain seperti biaya, fasilitas, waktu yang tersedia, populasi yang ada atau bersedia dijadikan sampel dan tujuan penelitian”

1.7.3 Metode Pengumpulan Data

1. Metode observasi
2. Metode wawancara
3. Metode kuisisioner
4. Metode dokumentasi

1. Metode Observasi

Sutrisno Hadi memberikan pengertian observasi sebagai berikut:

“Sebagai metode ilmiah observasi diartikan sebagai dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan mata kepala saja; melainkan juga semua jenis pengamatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung” (1982:36).

2. Metode Wawancara atau Interview

Menurut Soetrisno Hadi, wawancara adalah:

“Sebagai suatu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik , yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri, suaranya tampaknya merupakan alat pengumpulan informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial, baik yang terpendam maupun yang manifes” (1989:192).

3. Metode Kuisisioner

Kuisisioner merupakan metode penelitian dengan cara menyampaikan daftar pertanyaan kepada responden, seperti yang diutarakan oleh Koentjaraningrat bahwa: “Kuisisioner dimaksudkan sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari pada responden” (1991:173).

4. Metode Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data-data sekunder bagi penyusunan wilayah deskripsi wilayah penelitian, sehingga mampu mendukung dan memperjelas serta mempertahankan analisa penelitian.

1.7.4 Metode Analisa Data

Setelah data dapat terkumpul melalui beberapa metode pengumpulan data sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya data yang masih mentah tersebut diolah sedemikian rupa sehingga siap untuk dianalisis guna membuktikan hipotesis sebagaimana yang diajukan apakah diterima atau tidak yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang bersifat general.

Analisis data dapat dilakukan melalui analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Koentjoroningrat (1986:128) bahwa, "Sesungguhnya analisis itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan ini tergantung pada sifat data yang dikumpulkan si peneliti".

Dari pendapat tersebut penulis akan menggunakan analisis data kuantitatif atau statistik dengan teknik korelasi rank spearman (r_s) dengan alasan bahwa rank spearman adalah ukuran asosiasi yang menuntut kedua variabel sekurang-kurangnya dalam skala ordinal sehingga obyek-obyek atau individu-individu yang dipelajari dapat di rangking dalam 2 rangkaian berurut (Siegel, 1997:250), yang dirumuskan sebagai berikut.

Rumus Korelasi Rank Spearman :

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^N d_i^2}{N^3 - N}$$

dimana :

r_s : Koefisien korelasi

N : Jumlah responden

di : Perbedaan selisih antar jenjang

Jika terdapat rank kembar maka digunakan rumus sebagai berikut.

$$rs = \frac{\sum X^2 + \sum Y^2 - \sum di^2}{2\sqrt{(\sum X^2)(\sum Y^2)}}$$

dimana :

$$\sum X^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum Tx \qquad \sum Y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum Ty$$

Untuk mengetahui Tx dan Ty dapat dicari dengan menggunakan rumus :

$$\sum Tx = \frac{t^3 - t}{12} \qquad \sum Ty = \frac{t^3 - t}{12}$$

Untuk menguji rs digunakan t-test sebagai berikut :

$$t = rs \sqrt{\frac{N-2}{1-rs^2}}$$

Keterangan :

- rs : Rho (Korelasi Rank Spearman)
- X dan Y : Variasi antar variabel
- di : Diferensiasi Integral (Perbedaan Derajat Integral)
- Tx dan Ty : Frekuensi kembar dari variabel X dan Y
- t : Nilai kembar dari rank X dan Y

Langkah selanjutnya dari analisis data tersebut adalah pengukuran taraf kepercayaan atau taraf signifikansi dari hasil penelitian. Dalam hal ini penulis menentukan taraf signifikansi sebesar 95% dengan batas kesalahan sebesar 5%.

Setelah diperoleh dari hasil hitung analisis data, maka untuk menyimpulkan uji hipotesis yang telah penulis rumuskan dimuka ada beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Ho diterima apabila nilai rs hitung lebih kecil dari nilai atau harga tabel, berarti tidak terdapat pengaruh antara dua variabel.
- b. Ho ditolak apabila nilai rs hitung lebih besar atau sama dengan nilai atau harga tabel, berarti ada pengaruh antara dua variabel.

BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

2.1. Diskripsi Daerah Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian merupakan suatu gambaran mengenai lokasi atau daerah dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum dari lokasi penelitian, yaitu : Kantor Dinas koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana pembinaan usaha kecil terhadap pengusaha kecil dalam hal ini pengrajin tas dan koper yang berada di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan koperasi Intako sebagai wadah perajin tas dan koper yang memperoleh pembinaan . Digunakan suatu teknik dokumentasi dengan jalan memanfaatkan data sekunder yang telah tersedia, data sekunder ini memang sangat diperlukan dalam upaya mendukung dan memperjelas serta memahami kaitan hasil pengumpulan dan penganalisaan data sekunder yang benar-benar harus relevan dengan maksud dan tujuan penelitian serta diupayakan agar validitas data tersebut terjamin.

Dengan memperlihatkan deskripsi lokasi penelitian akan membantu peneliti dalam memahami kedudukan, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah serta pengusaha kecil di Kabupaten Sidoarjo.

2.2 Dasar Hukum Pembentukan Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah

1. Undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara RI. Nomor 41 tahun 1950).
2. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian (Lembaran Negara RI. Nomor 116 tahun 1992, tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3502).
3. Undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil (Lembaran Negara RI. Nomor 76 tahun 1995, tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3611).



4. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI. Nomor 60 tahun 1999, tambahan Lembaran Negara nomor 3839).
5. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara RI. Nomor 72 1999, tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3848).
6. Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara RI. Nomor 169 tahun 1999, tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3890) juncto Undang-undang nomor 8 tahun 1974 (Lembaran Negara RI. Nomor 55 tahun 1974, tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3041).
7. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara RI. Nomor 54 tahun 2000, tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3952).
8. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 tahun 1999 tentang teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden.
9. Peraturan Daerah No. 2 tahun 2001 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas-dinas daerah Kabupaten Sidoarjo.
10. Keputusan Bupati Sidoarjo No. 14 tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah No. 2 tahun 2001 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas-dinas daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah

2.3 Kedudukan Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah

Dinas koperasi dan pengusaha kecil menengah berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintah kabupaten dibidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah. Berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui

sekretaris daerah dan dalam melaksanakan tugas teknis administrasi dibina dan dikordinasikan oleh sekretaris daerah.

2.4. Tugas Pokok Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah

Dinas koperasi dan pengusaha kecil menengah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah di lingkungan pemerintah kabupaten berdasarkan kebijaksanaan kepala daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5. Fungsi Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam tugas pokok diatas, Dinas koperasi dan pengusaha kecil menengah mempunyai fungsi

1. Perumusan kebijaksanaan operasional dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan koperasi.
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produktivitas usaha koperasi.
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan usaha pengusaha kecil dan menengah.
5. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pembiayaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta koperasi simpan pinjam.
6. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
7. Pelaksanaan evaluasi program dan pelaporan hasil-hasil pembinaan dan pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
8. Pelaksanaan tugas-tugas dan ketatausahaan.
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sidoarjo.

2.6. Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.

Organisasi Dinas koperasi dan pengusaha kecil menengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha
3. Sub Dinas Kelembagaan Koperasi dan SDM
4. Sub Dinas Bina Usaha koperasi
5. Sub Dinas Bina Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam
6. Sub Dinas Bina Pengusaha Kecil dan Menengah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing bagian dan seksi dipimpin oleh seorang kepala bagian dan kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas koperasi dan pengusaha kecil menengah.

1. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan urusan kerumahtanggaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan kerja dinas koperasi, pengusaha kecil dan menengah dan merencanakan program kerja koperasi serta melaksanakan urusan pelaporan kearsipan dan dokumentasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan umum kerumahtanggaan dan urusan sumber daya manusia.
- b. Melakukan kordinasi kegiatan penyuluhan dan kehumasan.
- c. Melakukan pengembangan format sistem informasi koperasi , pengusaha kecil dan menengah.
- d. Melakukan urusan perencanaan dan evaluasi program kerja, pelaporan, kearsipan dan dokumentasi.
- e. Menyelenggarakan kearsipan umum dan kearsipan peraturan perundang-undangan.

Bagian tata usaha terdiri dari :

1. Urusan Kepegawaian
2. Urusan Keuangan
3. Urusan Umum

Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang kepala urusan atau kepala sub bagian dan bertanggungjawab kepada kepala bagian tata usaha.

Kasubag Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk pegawai, dan mutasi pegawai.
- b. Menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai.
- c. Mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai.
- d. Mengurus kesejahteraan pegawai.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian tata usaha sesuai dengan bidang usahanya.

Kasubag Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan.
- b. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai.
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian tata usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Kasubag Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat, pengetikan dan penggandaan serta tata usaha kearsipan.
- b. Mengurus administrasi perjalanan dinas tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan.
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas.
- d. Melakukan pengadaan, penyimpanan, perawatan dan pendistribusian serta mengelola administrasi perlengkapan dan peralatan kantor.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian tata usaha.

2. Sub Dinas Kelembagaan Koperasi dan SDM

Seksi Kelembagaan Koperasi dan SDM mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan, melaksanakan upaya pembinaan kelembagaan koperasi dibidang organisasi dan ketatalaksanaan hukum dan penyuluhan, serta pembinaan dan pengembangan SDM koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi kelembagaan koperasi dan SDM mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan serta penyusunan rencana kegiatan pembangunan dan pengembangan kelembagaan koperasi, dan sumber daya manusia koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
- b. Penyusunan pedoman pembinaan hukum, kelembagaan, ketatalaksanaan serta manajemen koperasi.
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi, dan sumberdaya manusia koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
- d. Pelaksanaan monitoring evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

Sub Dinas Kelembagaan Koperasi dan SDM terdiri dari :

1. Seksi organisasi dan tatalaksana
2. Seksi hukum peraturan dan penyuluhan
3. Seksi pengendalian dan pengawasan

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggungjawab kepada kepala Sub Dinas Kelembagaan Koperasi dan SDM.

Seksi organisasi dan tatalaksana mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana koperasi.
- b. Melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi dan tata laksana koperasi.
- c. Melaksanakan kegiatan klasifikasi koperasi
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Kelembagaan Koperasi dan SDM.

Seksi Hukum Peraturan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dibidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
- b. Memproses pengajuan permohonan akta pendirian badan hukum koperasi dan pengesahannya.
- c. Menyusun pedoman teknis tentang kerjasama antar penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran koperasi.
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi bina kelembagaan koperasi dan SDM.

Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan pengawasan sumberdaya manusia koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
- c. Melaksanakan kegiatan dan latihan serta kursus-kursus dalam rangka meningkatkan mutu sumberdaya manusia.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Bina Kelembagaan Koperasi dan SDM sesuai dengan bidang tugasnya.

Pengembangan Sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan dan latihan ketrampilan bagi pengusaha kecil untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja pengusaha kecil dalam pengelolaan administrasi dan manajemen usaha agar lebih tertib dan disiplin dalam setiap pelaksanaan tugas pekerjaan.

Berikut ini data kegiatan pendidikan dan latihan ketrampilan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah pada tahun 1999-2001.

Tabel II. Realisasi Program Pendidikan dan Latihan Ketrampilan pada tahun 1999-2001.

No.	Bidang Kegiatan	Waktu	Target Peserta	Realisasi
1	Penyuluhan Tentang Pentingnya Hak Paten Merek	Februari-1999	150	167
2	Diklat Administrasi I	Juni-1999	75	75
3	Diklat Administrasi II	November 1999	75	75
4	Diklat Manajemen I	Maret-2000	50	50
5	Diklat Manajemen II	Juni-2000	50	50

Sumber : Data Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.

Dari tabel diatas kegiatan pendidikan dan latihan ketrampilan dapat terealisasi, ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang hadir sama dengan jumlah target yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.

Dengan memberdayakan usaha kecil, diharapkan tercapai peningkatan produktivitas pengusaha kecil. Dengan peningkatan produktivitas tersebut diharapkan pengusaha kecil menjadi tangguh, mandiri dan juga dapat berkembang menjadi pengusaha menengah, sehingga akan meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja luas serta pemerataan hasil-hasil pembangunan yang akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap pendapatan daerah.

Oleh karena itu pihak Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Sidoarjo sebagai pelaksana kebijaksanaan pemerintah daerah pada sektor pelayanan publik melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mengatasi hambatan dan kendala dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas pengusaha kecil.

Sejalan dengan semangat otonomi luas yang baru saja dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berusaha untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mampu menggairahkan perekonomian di daerahnya. Salah satu program yang dilaksanakan adalah memberikan pembinaan terhadap para pengusaha kecil melalui bimbingan teknis, permodalan dan perkoperasian. Dengan pembinaan yang berkesinambungan melalui program yang tepat

diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pengusaha kecil sehingga mereka dapat menjadi penggerak roda perekonomian daerah.

3. Sub Dinas Bina Usaha Koperasi

Sub Dinas Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas menyiapkan rencana kegiatan serta melakukan pembinaan dibidang usaha koperasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Bina Usaha Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan serta penyusunan rencana pengembangan usaha koperasi .
- b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi.
- c. Pelaksanaan monitoring evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.

Sub Dinas Bina Usaha Koperasi terdiri dari :

1. Seksi Pertanian
2. Seksi Perdagangan
3. Seksi Industri dan Pertambangan

Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab kepada kepala Sub Dinas Bina Usaha Koperasi.

Seksi Pertanian mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan usaha koperasi pertanian.
- b. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi pertanian.
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha manajemen koperasi pertanian.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi bina usaha koperasi.

Seksi Perdagangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan usaha koperasi perdagangan, industri dan pertambangan.

- b. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi perdagangan, industri dan pertambangan.
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan manajemen koperasi perdagangan, industri dan pertambangan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi bina usaha koperasi.

Seksi Industri dan Pertambangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan usaha koperasi industri dan pertambangan.
- b. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi industri dan pertambangan.
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan manajemen koperasi industri dan perdagangan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi bina usaha koperasi.

4. Sub Dinas Bina Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam

Sub Dinas Bina Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan dan pengendalian kegiatan lembaga dibidang simpan pinjam serta fasilitas pembiayaan dan jasa keuangan. Untuk menyelenggarakan tersebut bina fasilitas pembiayaan simpan pinjam mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan pembinaan, pedoman dan fasilitas pembiayaan dalam pengembangan dibidang usaha simpan pinjam dan jasa keuangan.
- b. Pembinaan, evaluasi dan pengendalian terhadap kegiatan lembaga simpan pinjam, fasilitas pembiayaan dan jasa keuangan.
- c. Pengupayaan fasilitas penjaminan koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
- d. Pelaksanaan kordinasi dalam rangka fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, terdiri dari :

- 1) Seksi Simpan Pinjam.
- 2) Seksi Pembiayaan.
- 3) Seksi Pengendalian Simpan Pinjam.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada kepala Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

Seksi Simpan Pinjam mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman atau petunjuk teknis pengembangan organisasi dan usaha simpan pinjam.
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan lembaga keuangan masyarakat.
- c. Melakukan kordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pengembangan usaha simpan pinjam.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

Seksi Pembiayaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan fasilitas pembiayaan dan jasa keuangan.
- b. Melakukan pembiayaan dan upaya memfasilitasi permodalan usaha simpan pinjam.
- c. Menyiapkan petunjuk dalam membangun jaringan usaha dan kemitraan antara lembaga keuangan bank/non bank dengan lembaga usaha simpan pinjam.
- d. Melakukan kordinasi dalam upaya memfasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan lembaga simpan pinjam.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam.

Seksi Pengendalian Simpan Pinjam mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman pengendalian kegiatan simpan pinjam.

- b. Melaksanakan pengendalian internal lembaga dan usaha simpan pinjam.
- c. Memantau, menganalisa dan mengevaluasi manajemen lembaga usaha simpan pinjam.
- d. Melakukan kordinasi dalam upaya pengendalian, penilaian kinerja usaha simpan pinjam.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

Untuk membimbing pengusaha kecil memperoleh pinjaman modal melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 316/RMK.016/1994.

Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah merekomendasikan permohonan bantuan dana dalam bentuk kredit lunak kepada BUMN di kabupaten Sidoarjo. Mengenai jumlah dana yang diberikan tergantung pada kesepakatan antara pengusaha kecil dan BUMN pemberi kredit.

Berikut ini data bantuan kredit yang diterima oleh pengusaha kecil pada tahun 1999-2001.

Tabel III. Realisasi bantuan kredit pada tahun 1999-2001.

No.	Nama Pengusaha Kecil	Jenis Usaha	Jumlah Kredit	Pemberi Kredit
1	H.M. SHOLEHUDDIN	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	Bank Bukopin
2	KUSMAN	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	Bank Bukopin
3	H. RUSLAN	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	Bank Bukopin
4	H. SOLIKIN	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	Bank Bukopin
5	SAIYO	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	Bank Bukopin
6	PAISO	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	Bank Bukopin
7	ROFI'I	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	Bank Bukopin
8	H. ANWAR	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	Bank Bukopin
9	KARJO	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	Bank Bukopin
10	YAHMAN	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	Bank Bukopin
11	URIP MUJIONO	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	BRI
12	DARSO	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	BRI
13	TAKIP SETIAJI	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	BRI
14	DIMYATI	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	BRI
15	KARNOTO	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	BRI

16	SUKADI	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	BRI
17	MALIKI	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	BRI
18	H. TAMAN S. TEGUH	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	BRI
19	H. SODIKUN SAID	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	BRI
20	MOH. TOHIR	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	BRI
21	LASMIONO	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	Bank BNI
22	SUMANDRI	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	Bank BNI
23	Drs. MOH QOZIN	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	Bank BNI
24	MOH. MISBAH	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	Bank BNI
25	DARIP MUNTAJI	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	Bank BNI
26	ALEX MULYANTO	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	Bank BNI
27	SUMIRAN	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	Bank BNI
28	KHOIRON M. HAMZAH	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	Bank BNI
29	M. SYAHRONI ARIF	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	Bank BNI
30	AINUR ROFIQ S.T.	Perajin tas dan koper	Rp. 7 juta	Bank BNI

Sumber : Data Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk bantuan kredit dapat terealisasi 100 %, sehingga masing-masing pengusaha kecil dapat menerima bantuan kredit tersebut.

5. Sub Dinas Bina Pengusaha Kecil dan Menengah

Sub Dinas Bina Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan rencana kegiatan dan penjabaran kebijaksanaan teknik, melakukan pembinaan usaha dan manajemen kepada pengusaha kecil dan menengah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Bina Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan data penyusunan rencana kegiatan pembangunan, pengembangan usaha bagi pengusaha kecil dan menengah.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kelembagaan dan usaha pengusaha kecil dan menengah.
- c. Pelaksanaan monitoring evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sub Dinas Bina Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- 1) Seksi Industri Pertanian.
- 2) Seksi Industri Non Pertanian.
- 3) Seksi Perdagangan Dan Aneka Usaha.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada kepala Sub Dinas Bina Pengusaha Kecil dan Menengah.

Seksi Industri Pertanian mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan pengusaha kecil dan menengah.
- b. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan kelembagaan dan usaha kepada pengusaha kecil dan menengah dibidang industri pertanian.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap usaha dan manajemen pengusaha kecil dan menengah dibidang industri pertanian.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi bina pengusaha kecil dan menengah.

Seksi Industri Non Pertanian mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan pengusaha kecil dan menengah dibidang industri non pertanian.
- b. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan kelembagaan dan usaha kepada pengusaha kecil dan menengah dibidang industri non pertanian.
- c. Melakukan monitoring evaluasi terhadap usaha dan manajemen pengusaha kecil dan menengah dibidang industri non pertanian.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi bina pengusaha kecil dan menengah.

Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengusaha kecil dan menengah dibidang perdagangan dan aneka usaha.
- b. Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan kelembagaan dan usaha kepada pengusaha kecil dan menengah dibidang perdagangan dan aneka usaha.

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap usaha dan manajemen pengusaha kecil dan menengah dibidang perdagangan dan aneka usaha.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi bina pengusah kecil dan menengah.

Pengembangan jaringan usaha dilakukan melalui kegiatan pameran usaha dan temu kemitraan antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar dengan tujuan untuk membantu pengusaha kecil dalam memasarkan produknya dan usaha untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar.

Berikut ini kegiatan pameran usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah pada tahun 1999-2001.

Tabel IV. Realisasi program pameran usaha pada tahun 1999-2001.

No.	Nama Pameran	Waktu	Tempat	Peserta
1	Tanggulangun Fair	Februari-99	Sentra Industri	132 pengrajin
2	Sidoarjo Ekspo	Juni-00	Parkir Timur GOR Sidoarjo	8 pengrajin
3	Pekan Raya Jawa Timur	April-01	Taman Krida Budaya Malang	4 pengrajin
4	Surabaya Ekspo	September-01	Parkir Timur Plasa Surabaya	5 pengrajin
5	Tanggulangun Fair	Februari-02	Sentra Industri	147 pengrajin

Sumber : Data Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.

Dari tabel diatas kegiatan pameran usaha dapat terealisasi, dan kegiatan ini telah menjadi agenda rutin oleh Dinas Koperasi yang dalam pelaksanaannya selalu didukung penuh oleh perajin tas dan koper.

Kemudian untuk kegiatan temu kemitraan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah pada tahun 1999-2001 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V. Realisasi program temu kemitraan pada tahun 1999-2001.

No.	Bidang Kegiatan	Waktu	Target Peserta	Realisasi
1	Temu kemitraan pengusaha kecil dengan PT. Garuda Indonesia	Maret-99	150	150
2	Temu kemitraan pengusaha kecil dengan Air India (maskapai penerbangan India)	Januari-00	125	125
3	Temu kemitraan pengusaha kecil dengan PT. YMKI (perusahaan alat musik yamaha)	Maret-00	25	25
4	Temu kemitraan pengusaha kecil dengan PT. ERES REVCO (perusahaan kosmetik)	Januari-01	20	20
5	Temu kemitraan pengusaha kecil dengan Matahari Dept. Store	Juni-01	15	15

Sumber : Data koperasi industri tas dan koper Tanggulangin.

Dari tabel diatas kegiatan temu kemitraan dapat terealisasi dengan sangat baik, ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang hadir sama dengan jumlah target yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.

Dengan adanya kegiatan temu kemitraan tersebut, maka kemudian diikuti dengan kerjasama usaha oleh masing-masing pengusaha kecil dalam menjalankan kegiatan usahanya. Usaha kemitraan ini dilakukan untuk meningkatkan usaha yang lebih maju dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Berikut ini data pengusaha kecil yang telah melakukan kerjasama usaha atau kemitraan pada tahun 1999-2001.

Tabel VI. Realisasi Kemitraan Antar Pengusaha Kecil Tahun 1999-2001

No.	Nama mitra usaha	Realisasi
1	PT. Garuda Indonesia	Penyeragaman tas jamaah haji Indonesia
2	Air India (maskapai penerbangan India)	Pengadaan tas untuk pegawai maskapai
3	PT. YMPI (perusahaan alat musik yamaha)	Pengadaan tas alat musik
4	PT. ERES REVCO (perusahaan kosmetik)	Pengadaan tas alat kosmetik
5	Matahari Dept. Store	Pengerjaan order tas dan koper

Sumber : Data koperasi tas dan koper Tanggulangin Tahun 2001

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kemitraan dapat terealisasikan dengan baik sehingga perajin tas dan koper yang bernaung di koperasi Intako dapat bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar yang telah percaya dengan kemampuan perajin untuk mengerjakan pengadaan tas maupun koper bagi perusahaan tersebut.

Berikut ini contoh realisasi program kemitraan dengan pengusaha besar pada perajin tas dan koper melalui koperasi INTAKO.





PT. YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA (PT. YMPI)

Jl. Rembang Industri I/36
Kawasan Industri PIER Pasuruan
Jawa Timur - Indonesia

Phone : (0343) 740290
Fax : (0343) 740291



PERJANJIAN SUBKONTRAK

010 / INIK / II / 2002 / 0202CA05

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Perusahaan : PT YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA
Alamat : JL. REMBANG INDUSTRI I/36
PIER-PASURUAN

Adalah pemberi kerja, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.

2. Nama Perusahaan : KOPERASI INTAKO
Alamat : JL. Utama No.27, Kedensari
Tanggulangin - Sidoarjo

Adalah penerima kerja, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

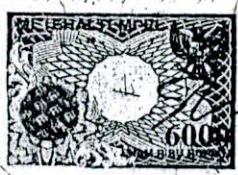
Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian sebagai berikut :

1. Pihak pertama memberi pekerjaan kepada pihak kedua sebagai subkontrak
2. Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan adalah PEMBUATAN CASE
3. Nama barang yang disubkontrakkan adalah LATCH, HINGE, BUMPER L, BUMPER S, OGR-P, OGL-P, OGR-G, OGL-G, WOODEN WASHER, PIN3*11, PIN3*13, PIN3*16, PIN4*18, BOTTOM LEGS, PC YCJ, CSCLOTH 3.5mm, SMALL LATCH, HANDLES, HANDLE POST N-HANDLE POST N330, SCREW SMF 4*15
Dan hasil pekerjaan subkontrak adalah TRC 403 ASSY, TRC 403 AD, CRC 2330 YCJ, CRC 2310, ASC 34J 34 II, ASC 34J 32E, ASC 34J 32E, ASC 24J, TSC 23 TS100, TSC 34J 34 II, TSC 34J 32E, TSC 23 TS100A, ASC 24J
4. Lama waktu penyelesaian pekerjaan adalah 60 hari sejak bahan diterima oleh pihak kedua
5. Jumlah barang yang disubkontrakkan sebanyak LATCH(2370 PCS), HINGE(2495 PCS), BUMPER L(1600 M), BUMPER S (600 M), OGR P(3580 PCS), OGL P(3580 PCS), OGR-G(1160 PCS), OGL-G(1160 PCS), WOODEN WASHER(825 PCS), PIN3*11 (6480 PCS), PIN3*13(25660 PCS), PIN3*16(6780 PCS), PIN4*18(6540 PCS), BOTTOM LEGS(5940 PCS), PC YCJ(794 M), CS CLOTH 3.5mm(806.5Y), SMALL LATCH(125 PCS), HANDLES(300 SETS), HANDLE POST N-040(600 PCS), HANDLE POST N330 (2370 SETS), SCREW SMF4*15(4740 PCS)
Dengan konversi hasil sama dengan/ kuranglebih
TRC 403(375 PCS), TRC 403 AD(240 PCS), CRC 2330 YCJ(170 PCS), CRC 2310(5 PCS), CRC 4330(35 PCS), ASC 34J 34 II(10 PCS), ASC 34J 32E(135 PCS), ASC 24J(40 PCS), TSC 23 TS100(20 PCS), TSC 34J 34 II(25 PCS), TSC 34J 32E(25 PCS), TSC 23 TS100A(40 PCS), TSC 24J(15 PCS)
6. Harga jasa subkontrak adalah sesuai dengan Rp 54980/PCS TRC 403 ASSY, Rp 54980/PCS TRC 403 AD, Rp 48185/PCS CRC 2330 YCJ, Rp 47035/PCS CRC 2310, Rp 48435/PCS CRC 4330, Rp 62960/PCS ASC 34J, Rp 60460/PCS ASC 24J, Rp 87315/PCS TSC 23, Rp 88815/PCS TSC 34J, Rp 87815/PCS TSC 24J
Dengan total nilai kuranglebih sebesar Rp 69,627,025.00
7. Pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama 30 hari setelah barang jadi diterima seluruhnya oleh Pihak Pertama.

Demikian perjanjian ini dibuat secara sadar dan tidak mendapat paksaan dari manapun juga.
Pasuruan, 08 MARET 2002

Pihak Pertama,
PT YMPI

Pihak Kedua,
KOPERASI INTAKO



(SHINSUKE SAITO)
DIRECTOR



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kemitraan dapat terealisasikan dengan baik sehingga perajin tas dan koper yang bernaung di koperasi Intako dapat bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar yang telah percaya dengan kemampuan perajin untuk mengerjakan pengadaan tas maupun koper bagi perusahaan tersebut.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari :

- 1) Petugas konsultasi lapangan.
- 2) Arsiparis.
- 3) Pustakawan.

Masing-masing petugas dikordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang berada di lingkungan dinas dan bertanggungjawab kepada kepala dinas koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

Petugas Konsultasi Lapangan (PKL) mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dan informasi koperasi dan pengusaha kecil.
- b. Menyusun rencana kerja kegiatan konsultasi dan penyuluhan untuk masyarakat, gerakan koperasi dan pengusaha kecil selama tahun anggaran sesuai dengan keadaan wilayah masing-masing dan menyelenggarakan konsultasi dan penyuluhan tersebut.
- c. Menyiapkan bahan-bahan, materi dan metode yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan konsultasi dan penyuluhan.
- d. Melaksanakan konsultasi, penyuluhan, bimbingan, monitoring, supervisi dan seluruh kegiatannya serta melakukan kordinasi dan pengusaha kecil.
- e. Melakukan kerjasama dengan para penyuluh atau petugas lapangan instansi yang terkait dalam melaksanakan penyuluhan dan konsultasi pembinaan koperasi dan pengusaha kecil.

- f. Melakukan inventarisasi dan bimbingan serta dapat bertindak sebagai mediator bagi koperasi dan pengusaha kecil yang melakukan kerjasama atau yang memperoleh bantuan dari pihak ketiga.
- g. Melakukan monitoring dan mengevaluasi kinerja dan ketangguhan koperasi dan pengusaha kecil.
- h. Membuat laporan seluruh kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan kepada kepala kantor dinas koperasi, pengusaha kecil dan menengah dengan tembusan kepada pejabat struktural yang menangani bidang koperasi, pengusaha kecil serta pendaftaran hukum pada kantor dinas koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

Arsiparis (khusus asisten arsiparis madya, asisten arsiparis dan ajun arsiparis muda) mempunyai tugas :

- a. Mendaftar arsip.
- b. Membuat pertelaan arsip.
- c. Memberikan/mendiskripsikan arsip dengan bimbingan.
- d. Membuat skema pengaturan arsip dengan bimbingan.
- e. Membuat senarai arsip.
- f. Membuat inventaris arsip dengan bimbingan.
- g. Membuat transliterasi arsip.
- h. Memberikan pelayanan jasa dan bahan kearsipan dengan bimbingan.
- i. Memberikan layanan konsultasi tentang pengelolaan sumber kearsipan dengan bimbingan.
- j. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan dengan bimbingan.
- k. Melakukan penyuluhan kearsipan dengan bimbingan.
- l. Melaksanakan program kearsipan melalui media massa dengan bimbingan.
- m. Menyelenggarakan pameran kearsipan dengan bimbingan.

Pustakawan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pelayanan/bahan pustaka dan informasi.
- b. Melakukan pemasyarakatan perpustakaan dan pengembangan profesi.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.7. Tata Kerja Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah

Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas koperasi, pengusaha kecil dan menengah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. disamping itu juga harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

2.8. Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan.

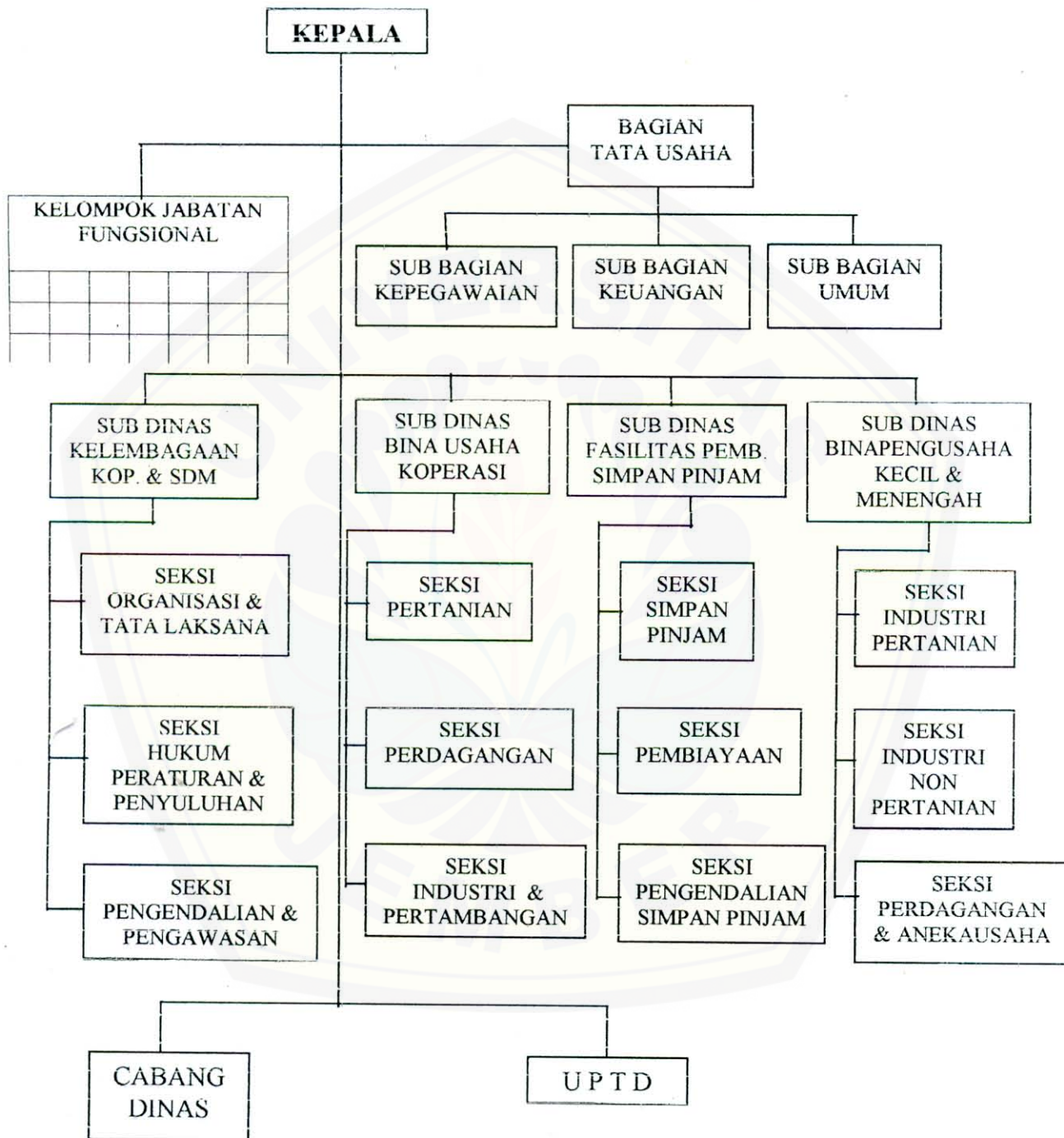
Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Kepala bagian tata usaha, kepala urusan, kepala seksi dan kepala sub seksi diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas usul kepala dinas melalui sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan kepala dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah tidak boleh dirangkap. Apabila kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah berhalangan menjalankan tugasnya, kepala dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dapat menunjuk kepala bagian tata usaha atau salah seorang kepala seksi untuk mewakilinya.

2.9. Keuangan Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan dinas koperasi dan pengusaha kecil menengah disediakan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta subsidi atau bantuan dari pemerintah atasan atau sumber dana lainnya yang diperoleh secara sah.

**Gambar II . BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN SIDOARJO**



2.10 Perajin Tas dan Koper di Kecamatan Tangulangin Kabupaten Sidoarjo

Penulis dalam melakukan observasi langsung ke Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah mendapatkan data tentang seluruh pengrajin tas dan koper yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang dibina oleh Dinas Koperasi dan PKM berjumlah 345 pengusaha yang menjadi anggota koperasi INTAKO keseluruhan berada di Kecamatan Tangulangin.

2.11 Koperasi INTAKO

INTAKO singkatan dari industri tas dan koper didirikan pada tanggal 7 april 1976 dengan beranggotakan sebanyak 27 orang. Setiap anggota diwajibkan membayar simpanan sebesar Rp. 5000,00. Jadi modal awal Koperasi INTAKO adalah Rp. 135.000,00. pada waktu itu mencari anggota sangat sulit, karena para pengrajin sudah bosan dengan adanya organisasi usaha. Hal ini dikarenakan sudah dua kali pernah ada organisasi usaha yaitu pada tahun 1969 berbentuk koperasi yang namanya Koperasi Budidaya dan pada tahun 1971 berbentuk CV. yang bernama CV. Tanggul Jaya. Kedua usaha tersebut tidak berlangsung lama dan akhirnya bubar, hal ini disebabkan pengelolaan manajemen yang kurang baik. Sekitar tahun 1974 keadaan pengrajin di daerah Kedensari mengalami kehancuran total. Kondisi ini terjadi dikarenakan banyaknya pengrajin sehingga produksi yang dihasilkan sangat melimpah tanpa disertai adanya sistem pemasaran yang baik. Jalan yang ditempuh oleh pengrajin pada masa itu adalah membanting harga produksi mereka agar diserap oleh pasar. Pada masa itu banyak pengusaha yang terlilit hutang sehingga membuat mereka menghentikan produksi tas dan kopernya atau beralih menjadi buruh di pabrik. Melihat kenyataan seperti itu ada beberapa orang yang dikenal sebagai penggagas mempunyai gagasan untuk mendirikan koperasi. Karena kegigihan mereka itulah koperasi dapat terbentuk dan diberi nama Koperasi INTAKO.

Dengan modal hanya Rp. 135.000,00 maka usaha koperasi hanya bisa melayani anggota dibidang pengadaan bahan penunjang, misalnya lem, paku, karton, dan sejenisnya. Dan tempatnya menumpang di emperan rumah salah seorang anggota koperasi. Berhubung pengelolaan koperasi dilandasi kejujuran

dan keterbukaan maka lambat laun koperasi INTAKO menjadi maju. Terbukti pada tahun 1981 INTAKO bisa membeli tanah dan dibangun untuk tempat usaha dan perkantoran. Melihat kenyataan tersebut banyak warga yang masuk menjadi anggota koperasi INTAKO. Pada tahun 1985 koperasi INTAKO membeli tanah lagi yaitu disebelah barat bangunan yang ada dan dibangun sebuah gedung untuk penjualan barang jadi. Dari situlah koperasi INTAKO mulai dikenal masyarakat agak luas. Pada tahun itu juga koperasi INTAKO memperoleh penghargaan Upahkarti dari presiden Soeharto sedangkan pada tahun 1989 mendapatkan juara I nasional gugus kendali mutu dan juara I pemula nasional tahun 1990, juara I madya nasional tahun 1991, juara I koperasi andalan nasional tahun 1992, juara I koperasi andalan utama tahun 1993 sampai tahun 1997 mendapat predikat koperasi teladan utama.

Karena koperasi usaha makin meningkat dan banyak pengunjung yang berdatangan maka banyak warga sekitar dan sepanjang jalan yang dilalui tamu-tamu koperasi memanfaatkan mendirikan toko-toko tas (*showroom*) sehingga daerah Kedensari tanggulagin terkenal sebagai daerah tas dan koper tanggulagin. Hingga kini ditengah situasi perdagangan yang sedang lesu koperasi INTAKO masih dapat berkembang karena selalu memperoleh pesanan dari perusahaan-perusahaan swasta maupun instansi pemerintah. barang-barang dagangan koperasi INTAKO dipasok oleh anggota karena koperasi INTAKO tidak memproduksi sendiri.

Tabel VII
Data Perkembangan Pengrajin Sampai Tahun 2000

TAHUN	UNIT	TAHUN	UNIT	TAHUN	UNIT
1976/79	27	1987	139	1995	172
1980	67	1988	139	1996	185
1981	74	1989	139	1997	187
1982	82	1990	143	1998	191
1983	105	1991	151	1999	201
1984	112	1992	155	2000	205
1985	118	1993	162		
1986	138	1994	172		

Sumber data : data koperasi INTAKO tahun 2001

Tabel VIII
Data Perkembangan Showroom Sampai Tahun 2000

Tahun	Jumlah
1981 – 1984	1
1985 – 1988	4
1988 – 1991	15
1992 – 1995	105
1996 – 1999	136
2000	147

Sumber data : data koperasi INTAKO tahun 2001

Tabel IX
Data Perkembangan Tenaga Kerja

TAHUN	JUMLAH
1986	lebih kurang 1300
1987	lebih kurang 2000
1988	lebih kurang 2000
1989	lebih kurang 2000
1990	lebih kurang 2000
1991	lebih kurang 1500
1992	lebih kurang 1800
1993	lebih kurang 2600
1994	lebih kurang 3000
1995	lebih kurang 3600
1996	lebih kurang 4000
1997	lebih kurang 4200
1998	lebih kurang 5500
1999	lebih kurang 5900
2000	lebih kurang 6350

Sumber data : data koperasi INTAKO tahun 2001

Berikut ini digambarkan secara jelas data peningkatan produktivitas 30 (tiga puluh) pengusaha kecil yang memproduksi tas dan koper di desa Kedensari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dari tahun 1999 yaitu tahun mulai dibinanya pengusaha kecil tersebut oleh Dinas Koperasi dan Pngusaha Kecil Menengah sampai tahun 2001.

Tabel X

Tabel Peningkatan Produktivitas Pengusaha Tas dan Koper Tahun 1999-2001

No.	Nama Pengusaha Kecil	Kuantitas Produksi		
		1999	2000	2001
1	H.M. Sholehuddin	1725	2155	2450
2	Kusman	1695	2110	2425
3	H. Ruslan	1715	2140	2395
4	H. Solikin	1705	2150	2460
5	Saiyo	1785	2160	2555
6	Paiso	1725	2168	2485
7	Rofi'l	1705	2144	2430
8	H. Anwar	1740	2205	2535
9	Karjo	1685	2105	2390
10	Yahman	1698	2120	2405
11	Urip Mujiono	1750	2165	2485
12	Darso	1710	2195	2488
13	Takip Setiaji	1700	2100	2400
14	Dimiyati	1745	2154	2465
15	Karnoto	1725	2204	2510
16	Sukadi	1745	2185	2419
17	Maliki	1775	2140	2455
18	H. Taman S. Teguh	1690	2135	2485
19	H. Sodikun Said	1715	2210	2498
20	Moh. Tohir	1650	2090	2480
21	Lasmiono	1735	2145	2505
22	Sumandri	1780	2035	2400
23	Drs. Moh. Qozin	1700	2155	2405
24	Moh. Misbah	1784	2164	2490
25	Darip Muntaji	1805	2220	2485
26	Alex Mulyanto	1735	2150	2455
27	Sumiran	1720	2150	2430
28	Khoiron M. Hamzah	1715	2090	2390
29	M. Syahroni Arif	1690	2155	2395
30	Ainur Rofiq S.T.	1695	2165	2410

Sumber data : data koperasi INTAKO tahun 2001

Sedangkan untuk mengetahui bagaimana produktivitas pengusaha kecil sebelum mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah maka akan penulis sajikan dalam data sebagai berikut:

Tabel XI

Tabel Produktivitas Pengusaha Tas dan Koper Tahun 1996-1998

No.	Nama Pengusaha Kecil	Kuantitas Produksi		
		1996	1997	1998
1	H.M. Sholehuddin	925	855	1100
2	Kusman	980	905	1095
3	H. Ruslan	970	895	1035
4	H. Solikin	910	810	985
5	Saiyo	850	820	1000
6	Paiso	920	900	975
7	Rofi'l	995	880	1105
8	H. Anwar	905	825	1015
9	Karjo	930	850	1000
10	Yahman	990	900	995
11	Urip Mujiono	880	825	915
12	Darso	935	900	940
13	Takip Setiaji	890	890	995
14	Dimiyati	910	940	1120
15	Karnoto	965	895	1095
16	Sukadi	890	875	920
17	Maliki	925	900	1025
18	H. Taman S. Teguh	930	920	1105
19	H. Sodikun Said	995	920	940
20	Moh. Tohir	984	935	925
21	Lasmiono	920	905	988
22	Sumandri	875	915	962
23	Drs. Moh. Qozin	945	905	1066
24	Moh. Misbah	890	865	985
25	Darip Muntaji	945	900	1000
26	Alex Mulyanto	905	905	995
27	Sumiran	895	890	895
28	Khoiron M. Hamzah	900	890	950
29	M. Syahroni Arif	990	965	1015
30	Ainur Rofiq S.T.	935	895	1090

Sumber data : data koperasi INTAKO tahun 2001

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tiga tahun sebelum dilaksanakannya program pembinaan oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah kuantitas pengusaha kecil yang memproduksi tas dan koper cenderung berfluktuasi dan bahkan mengalami penurunan kuantitas produksi. Hal ini dikarenakan pada masa tersebut terjadi krisis ekonomi yang melanda semua sektor usaha di Indonesia.

BAB III

PENYAJIAN DATA VARIABEL PENELITIAN

3.1 Pengantar

Tahap penyajian data penelitian ini merupakan kelanjutan dari langkah operasionalisasi suatu penelitian, maka sebelum membahas analisis data, terlebih dahulu dikemukakan variabel-variabel dan data empiris. Selanjutnya dalam penelitian ini akan diuraikan dengan data yang berdasarkan skor masing-masing variabel yang diperoleh dari kuesioner dengan menggunakan 30 responden penelitian.

Sebelum melangkah lebih lanjut terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud variabel. Sugiyono (1997:20) menyatakan bahwa, "Variabel didalam suatu penelitian merupakan suatu atribut yang lain dalam kelompok tersebut".

Adapun macam-macam variabel menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain diantaranya adalah variabel independen (pengaruh) dan variabel dependen (terpengaruh). Variabel pengaruh adalah variabel yang karena kedudukannya dalam suatu penelitian mempengaruhi variabel yang lain. Variabel terpengaruh adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel pengaruh.

Dalam penelitian ini akan ditelaah dua variabel yaitu:

1. Variabel pengaruh (X) yaitu Pembinaan Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah
2. Variabel terpengaruh (Y) yaitu Produktifitas Tas dan Koper

3.2 Variabel Pengaruh (X) yaitu Pembinaan Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah

Indikator dari variabel ini meliputi :

1. Penguatan akses untuk permodalan
2. Pengembangan jaringan usaha
3. Pengembangan sumber daya manusia



3.2.1 Penguatan akses untuk permodalan

Item dari indikator perilaku tugas adalah:

- a. Kemudahan untuk mendapatkan bantuan modal
- b. Kelancaran kredit yang diluncurkan
- c. Kondisi permodalan menjadi lebih baik

Untuk mengetahui jawaban responden atas item-item indikator penguatan akses untuk permodalan akan penulis sajikan dalam tabel berikut.



Tabel XII. Data berdasarkan skor dari indikator penguatan akses untuk permodalan

No	Indikator penguatan akses permodalan			Total Skor
	Item 1	Item 2	Item 3	
1	2	2	3	7
2	2	3	3	8
3	3	3	3	9
4	2	3	2	7
5	2	2	1	5
6	3	3	3	9
7	2	2	2	6
8	3	1	1	5
9	2	1	3	6
10	2	2	2	6
11	1	1	2	4
12	1	1	1	3
13	2	2	1	5
14	2	3	3	8
15	3	2	3	7
16	1	2	2	5
17	2	3	3	8
18	3	1	2	6
19	1	2	1	4
20	2	3	3	8
21	2	2	3	7
22	2	3	2	7
23	3	2	3	8
24	2	2	2	6
25	1	1	2	4
26	3	3	3	9
27	3	3	3	9
28	3	2	2	7
29	2	2	1	5
30	1	2	2	5

Sumber : Data primer, diolah tahun 2002

3.2.2 Pengembangan jaringan usaha

Item dari indikator perilaku tugas adalah:

- a. Membangun sistem pemasaran
- b. Kegiatan untuk melakukan temu kemitraan
- c. Tingkat kemajuan usaha setelah dilakukan kemitraan

Untuk mengetahui jawaban responden atas item-item indikator pengembangan jaringan usaha akan penulis sajikan dalam tabel berikut.



Tabel XIII. Data berdasarkan skor indikator pengembangan jaringan usaha

No	Indikator pengembangan jaringan usaha			Total Skor
	Item 1	Item 2	Item 3	
1	2	2	3	7
2	3	3	2	8
3	2	2	3	7
4	2	1	2	5
5	2	2	1	5
6	3	3	3	9
7	2	2	2	6
8	1	2	2	5
9	2	1	1	4
10	3	2	3	8
11	1	3	2	6
12	1	1	1	3
13	1	2	1	4
14	2	2	2	6
15	3	1	2	6
16	1	3	3	7
17	3	3	3	9
18	3	2	2	7
19	2	1	2	5
20	2	3	2	7
21	3	2	2	7
22	2	2	3	7
23	3	3	3	9
24	1	2	1	4
25	2	2	2	6
26	2	3	2	7
27	3	2	3	8
28	3	3	3	9
29	2	1	1	4
30	3	2	2	7

Sumber : Data primer, diolah tahun 2002

3.2.3 Pengembangan sumber daya manusia

Item dari indikator perilaku tugas adalah:

- a. Peningkatan pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan
- b. Peningkatan ketrampilan

Untuk mengetahui jawaban responden atas item-item indikator pengembangan sumber daya manusia akses untuk permodalan akan penulis sajikan dalam tabel berikut.



Tabel XIV. Data berdasarkan skor indikator pengembangan sumber daya manusia

No	Indikator pengembangan sumber daya manusia		Total Skor
	Item 1	Item 2	
1	2	2	4
2	2	2	4
3	3	2	5
4	2	1	3
5	2	1	3
6	3	3	6
7	2	3	5
8	1	1	2
9	1	2	3
10	2	2	4
11	1	2	3
12	1	1	2
13	2	1	3
14	2	2	4
15	2	2	4
16	1	2	3
17	3	3	6
18	2	2	4
19	1	1	2
20	2	3	5
21	2	2	4
22	3	2	5
23	3	3	6
24	2	1	3
25	1	2	3
26	3	3	6
27	3	3	6
28	3	3	6
29	2	2	4
30	3	2	5

Sumber : Data primer, diolah tahun 2002

Selanjutnya data untuk masing-masing indikator diatas disajikan daam satu tabel yang merupakan data keseluruhan dari variabel pembinaan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, seperti tabel berikut.

Tabel XV. Data skor gabungan variabel Pembinaan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah

No	Variabel Pembinaan			Total Skor
	1	2	3	
1	7	7	4	18
2	8	8	4	20
3	9	7	5	21
4	7	5	3	15
5	5	5	3	13
6	9	9	6	24
7	6	6	5	17
8	5	5	2	12
9	6	4	3	13
10	6	8	4	18
11	4	6	3	13
12	3	3	2	8
13	5	4	3	12
14	8	6	4	18
15	7	6	4	17
16	5	7	3	15
17	8	9	6	23
18	6	7	4	17
19	4	5	2	11
20	8	7	5	20
21	7	7	4	17
22	7	7	5	18
23	8	9	6	23
24	6	4	3	13
25	4	6	3	15
26	9	7	6	22
27	9	8	6	23
28	7	9	6	22
29	5	4	4	13
30	5	7	5	17

Sumber : Data primer, diolah tahun 2001

Dari tabel data dapat diketahui bahwa skor terendah dari variabel pembinaan adalah 8 dan skor tertinggi adalah 24, maka pengkategorianya adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} = \frac{24 - 8}{3} = 5,3 = 5$$

(Hadi, 1984:212)

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai interval adalah 5, maka pengkategorianya adalah sebagai berikut :

- 1) Total skor 8 – 12 adalah karegori rendah
- 2) Total skor 13 – 18 adalah kategori sedang
- 3) Total skor 19 – 24 adalah kategori tinggi

Data untuk masing-masing indikator diatas selanjutnya disajikan dalam suatu tabel sebagai berikut.

Tabel XVI Total Skor dan Kategori Variabel Pembinaan Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah

No.	Total Skor	Kategori
1	18	Sedang
2	20	Tinggi
3	21	Tinggi
4	15	Sedang
5	13	Sedang
6	24	Tinggi
7	17	Sedang
8	12	Rendah
9	13	Sedang
10	18	Sedang
11	13	Sedang
12	8	Rendah
13	12	Rendah
14	18	Sedang
15	17	Sedang
16	15	Sedang
17	23	Tinggi
18	17	Sedang
19	11	Rendah
20	20	Tinggi
21	17	Sedang
22	18	Sedang
23	23	Tinggi
24	13	Sedang
25	15	Sedang
26	22	Tinggi
27	23	Tinggi
28	22	Tinggi
29	13	Sedang
30	17	Sedang

Sumber : data primer, diolah tahun 2002

Data-data yang telah disajikan diatas, selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel frekuensi kategori jawaban seperti dibawah ini.

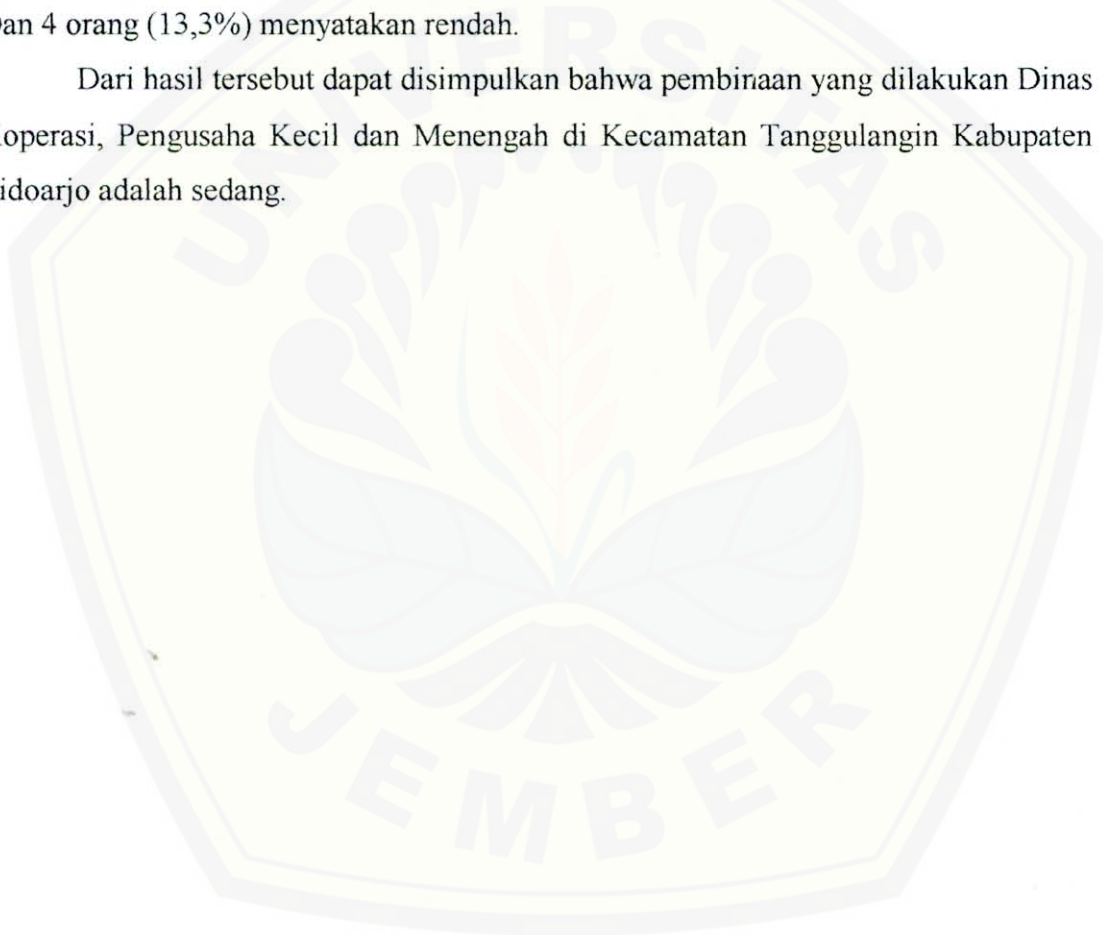
Tabel XVII. Frekuensi Kategori Jawaban Responden Terhadap Variabel X

Variabel	Kategori	Frekuensi	Prosentase
Variabel X	Tinggi	9	30,0%
	Sedang	17	56,7%
	Rendah	4	13,3%

Sumber : Data primer, diolah tahun 2002

Berdasarkan tabel frekuensi diatas dapat diketahui bahwa dari 30 orang responden, sebanyak 9 orang responden (30,0%) menyatakan bahwa tingkat pembinaan tergolong tinggi. Untuk 17 orang responden (56,7%) menyatakan sedang. Dan 4 orang (13,3%) menyatakan rendah.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo adalah sedang.



3.3 Variabel Terpengaruh (Y) yaitu Produktivitas Tas dan Koper

Indikator dari variabel ini meliputi:

1. Production (jumlah produk yang dihasilkan)
2. Production time required to do job (lamanya suatu unit produk yang dihasilkan)
3. Increase learning rate (kenaikan pendapatan sebagai akibat naiknya barang yang dihasilkan)
4. Decrease industri breaking (berkurangnya kerusakan dari produk yang dihasilkan)

4.3.1 Production (jumlah produk yang dihasilkan)

Item dari indikator production adalah :

- a. Jumlah produk yang dihasilkan

Untuk mengetahui jawaban responden atas item indikator production akan penulis sajikan dalam tabel berikut.

Tabel XVIII. Data berdasarkan skor dari indikator production

No	Indikator Pruduction Item 1	Total Skor
1	2	2
2	3	3
3	2	2
4	1	1
5	1	1
6	3	3
7	2	2
8	2	2
9	1	1
10	3	3
11	1	1
12	2	2
13	1	1
14	2	2
15	2	2
16	3	3
17	3	3
18	2	2
19	3	3
20	2	2
21	3	3
22	2	2
23	3	3
24	2	2
25	2	2
26	3	3
27	3	3
28	3	3
29	2	2
30	1	1

Sumber : Data primer, diolah tahun 2002

4.3.2 Production time required to do job (lamanya suatu unit produk yang dihasilkan)

Item dari indikator production time required to do job adalah :

- a. Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk

Untuk mengetahui jawaban responden atas item-item indikator production time required to do job akan penulis sajikan dalam tabel berikut.



Tabel XIX. Data skor berdasarkan indikator production time required to do job

No	Indikator Production time required to do job	Total Skor
Item 1		
1	2	2
2	2	2
3	3	3
4	2	2
5	3	3
6	3	3
7	2	2
8	2	2
9	2	2
10	2	2
11	1	1
12	1	1
13	2	2
14	3	3
15	3	3
16	2	2
17	3	3
18	3	3
19	2	2
20	2	2
21	3	3
22	1	1
23	3	3
24	2	2
25	1	1
26	3	3
27	2	2
28	3	3
29	2	2
30	1	1

Sumber : Data primer, diolah tahun 2002

4.3.3 Increase learning rate (kenaikan pendapatan sebagai akibat naiknya barang yang dihasilkan)

Item dari indikator increase learning rate adalah :

- a. Kenaikkan pendapatan sebagai akibat naiknya barang yang dihasilkan

Untuk mengetahui jawaban responden atas item-item indikator increase learning rate akan penulis sajikan dalam tabel berikut.



Tabel XX. Data skor berdasarkan indikator Increase learning rate

No	Indikator Increasing learning rate	Total Skor
Item 1		
1	1	1
2	2	2
3	2	2
4	1	1
5	2	2
6	3	3
7	2	2
8	3	3
9	2	2
10	1	1
11	1	1
12	2	2
13	1	1
14	2	2
15	3	3
16	2	2
17	3	3
18	2	2
19	2	2
20	2	2
21	3	3
22	2	2
23	3	3
24	2	2
25	2	2
26	3	3
27	3	3
28	2	2
29	1	1
30	1	1

Sumber : Data primer, diolah tahun 2002

4.3.4 Decrease industri breaking (berkurangnya kerusakan dari produk yang dihasilkan)

Item dari indikator Decrease industri breaking adalah :

- a. Kerusakan produk yang dihasilkan

Untuk mengetahui jawaban responden atas item indikator decrease industri breaking akan penulis sajikan dalam tabel berikut.



Tabel XXI. Data skor berdasarkan indikator decrease industri breaking

No	Indikator Decrease industri breaking	Total Skor
Item 1		
1	2	2
2	3	3
3	2	2
4	2	2
5	3	3
6	3	3
7	2	2
8	3	3
9	1	1
10	2	2
11	1	1
12	2	2
13	1	1
14	3	3
15	3	3
16	2	2
17	3	3
18	2	2
19	3	3
20	2	2
21	2	2
22	3	3
23	3	3
24	2	2
25	2	2
26	3	3
27	3	3
28	3	3
29	1	1
30	1	1

Sumber : Data primer, diolah tahun 2002

Selanjutnya data untuk masing-masing indikator diatas disajikan daam satu tabel yang merupakan data keseluruhan dari variabel pembinaan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, seperti tabel berikut.

Tabel XXII. Data skor gabungan variabel produktivitas perajin tas dan koper

No	Variabel Y				Total Skor
	1	2	3	4	
1	2	2	1	2	7
2	3	2	2	3	10
3	2	3	2	2	9
4	1	2	1	2	6
5	1	3	2	3	9
6	3	3	3	3	12
7	2	2	2	2	8
8	2	2	3	3	10
9	1	2	2	1	6
10	3	2	1	2	8
11	1	1	1	1	4
12	2	1	2	2	7
13	1	2	1	1	5
14	2	3	2	3	10
15	2	3	3	3	11
16	3	2	2	2	9
17	3	3	3	3	12
18	2	3	2	2	7
19	3	2	2	3	10
20	2	2	2	2	8
21	3	3	3	2	11
22	2	1	2	3	8
23	3	3	3	3	12
24	2	2	2	2	8
25	2	1	2	2	7
26	3	3	3	3	12
27	3	2	3	3	11
28	3	3	2	3	11
29	2	2	1	1	6
30	1	1	1	1	4

Sumber : Data primer, diolah tahun 2002

Dari tabel data dapat diketahui bahwa skor terendah dari variabel Y adalah 4 dan skor tertinggi adalah 12, maka pengkategorian adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} = \frac{12 - 4}{3} = 2,6 = 3$$

(Hadi, 1984:212)

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai interval adalah 5, maka pengkategorian adalah sebagai berikut :

- 4) Total skor 4 – 6 adalah karegori rendah
- 5) Total skor 7 – 9 adalah kategori sedang
- 6) Total skor 10 – 12 adalah kategori tinggi

Data untuk masing-masing indikator diatas selanjutnya disajikan dalam suatu tabel sebagai berikut.

Tabel XXIII. Data skor berdasarkan variabel produktivitas parajin tas dan koper

No	Total Skor	Kategori
1	7	Sedang
2	10	Tinggi
3	9	Sedang
4	6	Rendah
5	9	Sedang
6	12	Tinggi
7	8	Sedang
8	10	Tinggi
9	6	Rendah
10	8	Sedang
11	4	Rendah
12	7	Sedang
13	5	Rendah
14	10	Tinggi
15	11	Tinggi
16	9	Sedang
17	12	Tinggi
18	7	Sedang
19	10	Tinggi
20	8	Sedang
21	11	Tinggi
22	8	Sedang
23	12	Tinggi
24	8	Sedang
25	7	Sedang
26	12	Tinggi
27	11	Tinggi
28	11	Tinggi
29	6	Rendah
30	4	Rendah

Sumber : Data primer, diolah tahun 2002

Data-data yang telah disajikan diatas, selanjutnya dimasukkan kedalam tabel frekuensi kategori jawaban seperti dibawah ini.

Tabel XXIV. Frekuensi Kategori Jawaban Responden Terhadap Variabel Y

Variabel	Kategori	Frekuensi	Prosentase
Variabel Y	Tinggi	12	40%
	Sedang	15	50%
	Rendah	3	10%

Sumber : Data primer, diolah tahun 2002

Berdasarkan tabel frekuensi diatas dapat diketahui bahwa dari 30 orang responden, sebanyak 12 orang responden (40%) menyatakan bahwa tingkat produksi tas dan koper tergolong tinggi. Untuk 15 orang responden (50%) menyatakan sedang. Dan 3 orang (10%) menyatakan rendah.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa produktivitas perajin tas dan koper di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo adalah sedang.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pada bab-bab sebelumnya, maka tahap terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil merupakan hasil analisa yang penulis lakukan.

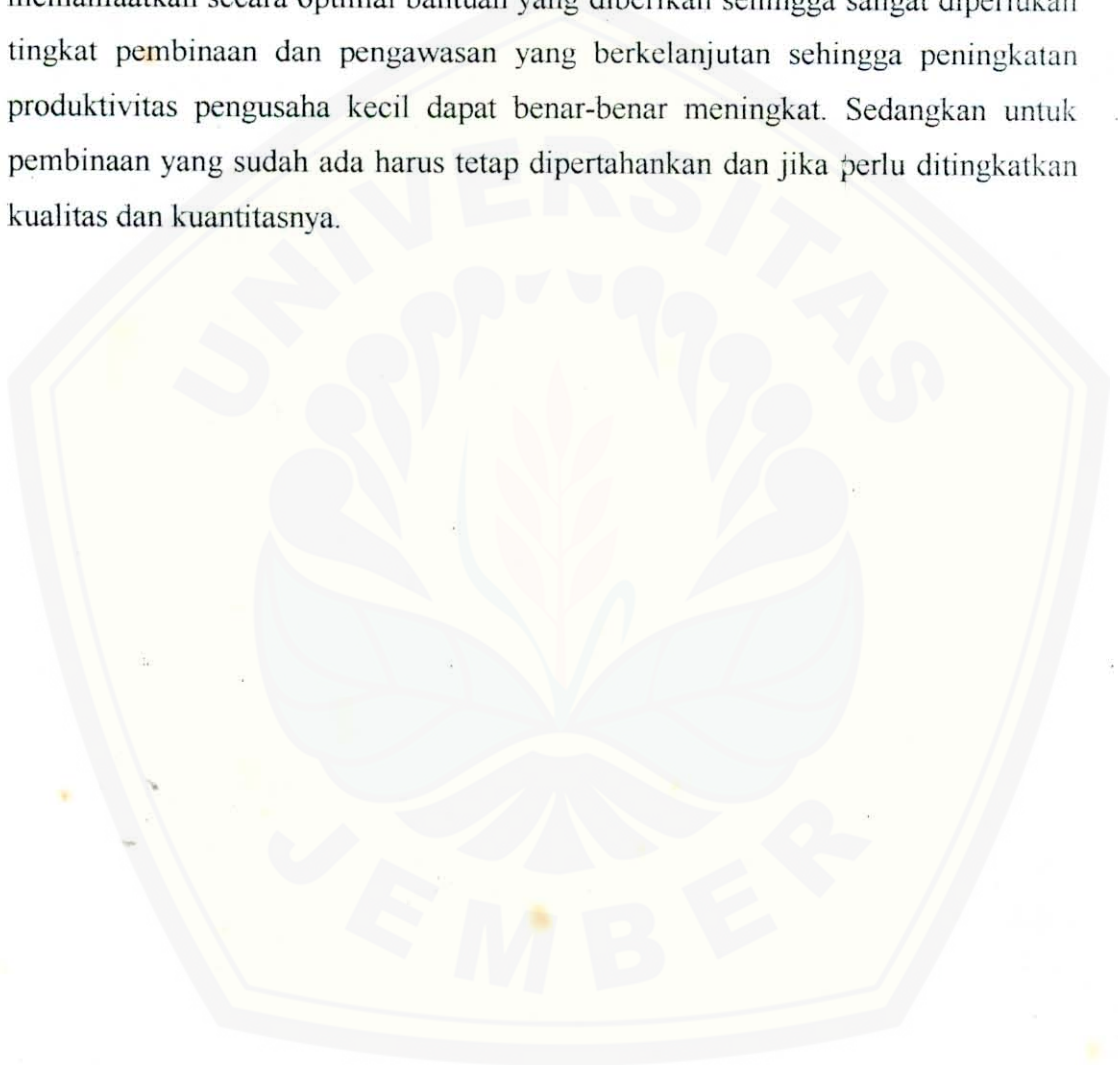
Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah organisasi pelayanan publik (public service) dinas koperasi dan pengusaha kecil menengah melaksanakan pembinaan usaha kecil dengan melaksanakan pembinaan usaha kecil dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui: bimbingan bantuan permodalan, pengembangan jaringan usaha, dan pengembangan sumber daya manusia bagi pengusaha kecil agar menjadi pengusaha menengah dan maju sehingga mampu menciptakan iklim usaha yang baik, memperluas lapangan pekerjaan dan banyak menyerap tenaga kerja. Dengan demikian pengusaha kecil diharapkan untuk mampu memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Pembinaan usaha kecil yaitu: bimbingan bantuan permodalan, pengembangan jaringan usaha dan pengembangan sumber daya manusia menunjukkan kriteria yang sedang yaitu 56,7% dapat terlaksana dan dinikmati pengusaha kecil. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan usaha kecil dapat terealisasi dan mengena pada sebagian besar pengusaha kecil.
3. Untuk peningkatan produktivitas pengusaha kecil menunjukkan kriteria yang tinggi pula, ini dapat dilihat dari peningkatan kuantitas produksi masing-masing pengusaha kecil yang terus meningkat dari tahun 1991 sampai tahun 2001.
4. Setelah dilakukan pengujian data dengan uji t test dengan taraf kepercayaan 95% dan $\alpha = 0,05$ ternyata harga t hitung (4,923) lebih besar daripada t tabel yaitu 2.048 sehingga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

ada hubungan antara pembinaan usaha kecil yang dilakukan oleh dinas koperasi dan pengusaha kecil menengah dengan peningkatan produktivitas pengusaha kecil.

5.2 Saran

Meskipun dalam melaksanakan pembinaan usaha kecil yang berbentuk tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dapat terealisasi dengan baik, namun masih banyak pengusaha kecil yang belum mampu memanfaatkan secara optimal bantuan yang diberikan sehingga sangat diperlukan tingkat pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan sehingga peningkatan produktivitas pengusaha kecil dapat benar-benar meningkat. Sedangkan untuk pembinaan yang sudah ada harus tetap dipertahankan dan jika perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Francis M. 1991. **Modernisasi di Dunia Ketiga: Suatu Teori Umum Pembangunan** (Terjemahan), Cet I November. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Arif Sritua, DR. 1998. **Teori dan Kebijakan Pembangunan**. Jakarta: Cidesindo .
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1997. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**. Jember: UNEJ
- BP2K-Kadin Indonesia. 1997. **Petunjuk Bagi Pengusaha Kecil Seluruh Indonesia**. Jakarta
- Bryant, Coralie dan White, Louse G. 1997. **Manajemen Pembangunan: Untuk Negara Berkembang** (Terjemahan). Jakarta:LP3ES
- Handoko, Hani. 1998. **Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia**. Yogyakarta: BPFE
- Kartasasminata, Ginanjar. 1997. **Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia**. Jakarta: LP3ES
- Kazt, Soul. M. 1996. **Exploring a System Approach to Development Administration**, di Dalam Riggs, Fred W. (Ed) **Administrasi Pembangunan** Jakarta: Rajawali Press
- Korten, C. David. 1984. **Pembangunan yang Memihak Rakyat: Kepastian Tentang Teori dan Metode Pembangunan** (Terjemahan). Lembaga Studi Pembangunan Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, Dr. 1996. **Ekonomi Pembangunan**. Yogyakarta: BPFE .
- Perda Kabupaten Sidoarjo No. 14 Tahun 2001 **Tentang Susunan Organisasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Sidoarjo**

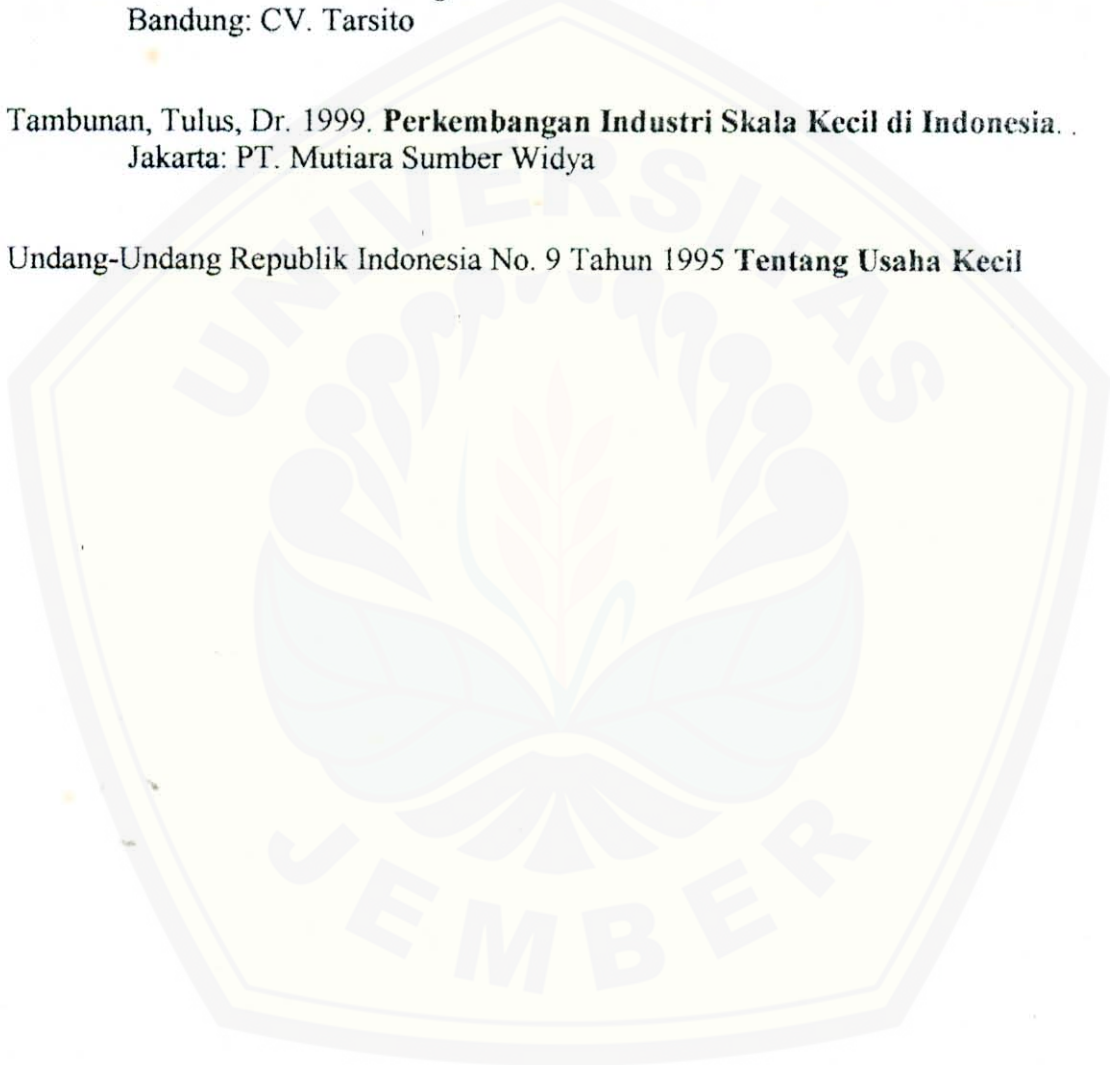
Sidney. Siegel 1992. **Statistik Parametrik untuk Ilmu Sosial** . Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama

Sinungan, Muchdarsyah, Drs. 1997. **Produktivitas Apa dan Bagaimana**.
Jakarta: Bumi Aksara

Surakhmad, Winarno. 1994. **Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode**.
Bandung: CV. Tarsito

Tambunan, Tulus, Dr. 1999. **Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia**.
Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 **Tentang Usaha Kecil**



KUESIONER

**PENGARUH PEMBINAAN USAHA KECIL OLEH
DINAS KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH
TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PENGUSAHA KECIL**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, penulis sampaikan salam sejahtera semoga bapak/ibu/saudara senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Sehubungan dengan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan guna menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan ilmu administrasi, program studi administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Maka penulis bermaksud membuktikan apakah ada pengaruh Pembinaan usaha kecil oleh Dinas koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah terhadap peningkatan produktivitas pengusaha kecil.

Dalam rangka tersebut, penulis meminta bantuan bapak/ibu/saudara untuk mengisi questioner/daftar pertanyaan yang penulis ajukan, dalam upaya untuk menggali informasi yang sebenar-benarnya. Kerahasiaan jawaban bapak/ibu/saudara akan penulis jamin.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan bapak/ibu/saudara yang meluangkan waktunya untuk mengisi questioner, penulis memohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan bapak/ibu/saudara sekalian.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Penulis

Achmad Musyarifin

Nim : 96-1188

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Umur :
4. Pendidikan :
5. Alamat :
6. Status dalam perusahaan :
 - a. pemilik sekaligus manajer
 - b. manajer (pengelola)
 - c. lainnya, sebutkan.....

Pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap sesuai dan benar dengan memberi tanda silang (X).

Indikator Bimbingan Bantuan Permodalan

1. Apakah saudara memperoleh kemudahan untuk mendapatkan bantuan modal atas bimbingan dari Dinas Koperasi dan PKM ?
 - a). Ya
 - b). Tidak
2. Apakah kredit yang seharusnya anda terima mengalami hambatan/kendala dalam pengcurannya ?
 - a). Ya
 - b). Tidak
3. Apakah kondisi permodalan saudara lebih baik setelah mendapatkan bimbingan dari Dinas Koperasi dan PKM ?
 - a). Ya
 - B). tidak

Indikator Pengembangan Jaringan Usaha

1. Apakah Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dalam melaksanakan pameran usaha melibatkan atau mengikutsertakan produk anda dalam upaya untuk membantu pemasaran usaha saudara ?
 - a). Ya
 - B). tidak
2. Apakah pihak Dinas koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah malibatkan saudara dalam kemitraan antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar ?
 - a). Ya
 - b). Tidak



Nomor : *SP/*J25.3.1/PL.5/2002
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin melaksanakan
Penelitian

31 Mei 2002

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Perlindungan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
di -

SIDOARJO.

Menunjuk surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember No. 1697/J25.1.2/PL.5/2002 tanggal 30 Mei 2002, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : ACHMAD MUSYARIFIN / 96-1188
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik / Administrasi Negara
Alamat : Tulangan Sidoarjo.
Judul Penelitian : Hubungan Pembinaan Oleh Dinas Koperasi Peng-
Usaha Kecil Dan Menengah Dengan Produktifitas
Pengrajin Tas Dan Koper Di Kec. Tanggul Angin
Kabupaten Sidoarjo.
Lokasi : Sentra Industri Tas Dan Koper Tanggul Angin.
Lama Penelitian : 2 (dua) bulan.

Maka kami mohon dengan hormat bantuan serta perkenan saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara disampaikan terima kasih.

Ketua,

Dr. Ir. T. Sutikto, MSc.
NIP. 131 131 022

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs.
3. Arsip.



Nomor : 072/ 1160 / 404.4.4/2002

Sidoarjo, 5 Juni 2002

Sifat : Penting

Kepada

Lampiran : -

Yth. Sdr. 1. KADIN KOPERASI & PKM

Perihal : Pelaksanaan untuk melakukan

KABUPATEN SIDOARJO

survey / research a/n

2. CAMAT TANGGULANGIN

Sdr. ACH. MUSYARIFIN

DI TANGGULANGIN

Berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian UNIV. JEMBER

No. 598/J25.3.1/PL.5/2002

tanggal 31 Mei 2002

perihal surat keterangan untuk melakukan survey / research, maka bersama ini kami hadapkan

SDR. ACHMAD MUSYARIFIN, MHS. FISIP UNIV. JEMBER JURUSAN ADM. NEGARA

NIM : 96-1188

ALAMAT : TULANGAN SIDOARJO

untuk melakukan survey / research di kantor / Wilayah Saudara dengan thema "

" HUBUNGAN PEMBINAAN OLEH DINAS KOPERASI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN PRODUKTIVITAS PENGRAJIN TAS DAN KOPER DI KEC. TANGGULANGIN

KABUPATEN SIDOARJO " " selama

2 (dua) bulan terhitung mulai tgl. surat dikeluarkan .

Demikian untuk menjadikan maklum.

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
 PLT. KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
 BADAN KESATUAN BANGSA & PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Drs. SUPRIYADI
 PEMBINA
 NIP. 510 055 623

Tembusan :

Yth. Sdr. Ketua Lemlit UNIV. Jember
Di JEMBER .



Sidoarjo, 27 Juni 2002

N o m o r : 0721359/1404.3.4/2002
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Pelaksanaan Penelitian

Kepada
Yth. Sdr. Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Jember
di
J E M B E R

Sehubungan dengan surat saudara no : 598/925.3.1/PL.5/2002 tanggal 7 Juni 2002 perihal permohonan ijin dengan ini kami menerangkan bahwa :

N a m a : ACHMAD MUSYARIFIN
N I M : 96 - 1188
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
Universitas : JEMBER

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan tugas penelitian di Dinas Koperasi, PK & M Kabupaten Sidoarjo dengan baik, terhitung mulai tanggal 7 Juni s/d 27 Juni 2002.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



[Signature]
Drs. SUGENG HARYADI
Pembina Tk. I
NIP. 070 021 314



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER